



**LKIP**  
**BADAN**  
**NARKOTIKA**  
**NASIONAL**  
**PROVINSI**  
**ACEH**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Laporan ini menjadi representasi komprehensif atas capaian kinerja yang mencakup pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi indikator harmonisasi antara rencana kerja dengan hasil nyata yang telah dicapai oleh BNN Provinsi Aceh sepanjang Tahun 2024 dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di wilayah Provinsi Aceh.

Pada Tahun Anggaran 2024, BNN Provinsi Aceh melaksanakan dua program strategis utama, yaitu **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN**, serta **Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**. Implementasi kedua program ini berlandaskan rencana strategis BNN yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi kelembagaan secara optimal. Sebagai perpanjangan tangan BNN di tingkat daerah, Kepala BNN Provinsi Aceh memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan serta mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel, baik kepada Kepala BNN Pusat secara hierarkis maupun kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan penerima manfaat program.

Secara umum, capaian strategis yang telah ditetapkan BNN Provinsi Aceh pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan. Beberapa indikator kinerja bahkan melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi refleksi sekaligus motivasi dalam mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terstruktur serta terarah di masa mendatang.

Pencapaian yang diraih tidak lepas dari kontribusi seluruh personel BNN Provinsi Aceh yang telah bekerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak yang turut berkolaborasi dalam menyukseskan implementasi program P4GN di Provinsi Aceh. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan program di masa depan.

Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Provinsi Aceh sepanjang Tahun 2024. Di samping itu, laporan ini juga diharapkan menjadi rujukan penting dalam merumuskan langkah strategis yang lebih baik untuk mendukung keberhasilan program P4GN di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai Kepala BNN Provinsi Aceh, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, penyusunan dokumen, maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Kami terbuka terhadap saran dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan laporan ini di masa mendatang.

Besar harapan kami agar laporan ini tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, tetapi juga menjadi sarana evaluasi yang efektif untuk terus meningkatkan kinerja BNN Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 21 Januari 2025



**Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

BNN Provinsi Aceh, sebagai perwakilan Badan Narkotika Nasional di tingkat daerah, telah melaksanakan dua program utama, yaitu:

1. **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN**, serta
2. **Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).**

Realisasi target kinerja dari kedua program tersebut diimplementasikan melalui 15 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Kegiatan.

Pencapaian target kinerja BNN Provinsi Aceh pada tahun 2024 telah mencerminkan semakin optimalnya peran berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pengembangan program P4GN. Partisipasi aktif masyarakat ini diwujudkan melalui peningkatan kerja sama dan pelaksanaan program P4GN secara mandiri oleh pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), instansi swasta, maupun organisasi kemasyarakatan. Hasilnya, informasi yang diperoleh semakin akurat dan berdampak signifikan pada keberhasilan pengungkapan kasus narkotika di wilayah Provinsi Aceh.

Berdasarkan evaluasi kinerja, BNN Provinsi Aceh setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian, di balik keberhasilan tersebut, terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kebutuhan mendesak saat ini adalah penambahan tenaga di bidang pemberantasan, terutama penyidik, serta peningkatan jumlah pejabat fungsional lainnya.

Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah strategis telah diambil, termasuk mengajukan permohonan kepada pembina fungsi (BNNP) guna mendapatkan tambahan personel yang dibutuhkan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, BNN Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2024 berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 100%. Prestasi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan terukur, serta kemampuan dalam memaksimalkan alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Hal ini juga menjadi bukti komitmen BNN Provinsi Aceh dalam mengelola sumber daya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Capaian kinerja BNN Provinsi Aceh selama tahun anggaran 2024 dianalisis melalui berbagai metode, termasuk kuesioner, pemantauan langsung kepada penerima manfaat program, monitoring dan evaluasi, serta masukan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengevaluasi capaian kinerja, yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun grafik guna menggambarkan perkembangan yang telah dicapai.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>6</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
A. LATAR BELAKANG .....	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
C. DASAR HUKUM .....	8
D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN .....	8
1. TUGAS.....	8
2. FUNGSI.....	9
3. KEWENANGAN.....	10
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) 2020 – 2024.....	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA .....	17
<b>BAB III .....</b>	<b>20</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	20
1. RINGKASAN KINERJA.....	20
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	23
<b>BAB IV .....</b>	<b>121</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. KESIMPULAN .....	121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

---

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin mengancam tatanan sosial mendorong pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang komprehensif guna mengatasi permasalahan ini secara nasional. Salah satu kebijakan utama adalah penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan struktur BNN sebagai institusi vertikal yang berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota, disertai dengan penguatan implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai institusi pemerintah, BNN memiliki kewajiban konstitusional untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diatur secara komprehensif melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan hadirnya satuan kerja vertikal di berbagai daerah, diperlukan penerapan sistem pengukuran kinerja yang seragam, akurat, tepat sasaran, dan informatif. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan konsistensi, efektivitas pengawasan, serta keselarasan pengukuran kinerja antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Pelaksanaan tugas ini harus selaras dengan keberadaan dan kapasitas satuan kerja dalam struktur organisasi BNN, yang diintegrasikan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mencakup berbagai komponen strategis, meliputi perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, hingga

proses revidi dan evaluasi kinerja yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program secara menyeluruh.

Seiring dengan pelaksanaan reorganisasi dan restrukturisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan peningkatan etos kerja dan profesionalisme yang tinggi guna mendukung visi dan misi strategis BNN. Dalam konteks ini, BNN Provinsi Aceh diwajibkan untuk menetapkan target kinerja yang terukur, melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja tersebut, serta menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Target kinerja yang harus dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh pada tahun 2024 merupakan penjabaran menyeluruh dari visi, misi, serta tujuan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 dan Rencana Program Kerja (Renproja) Tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan serta program yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berlandaskan pada hasil capaian indikator kinerja dari setiap unit kerja di lingkungan BNNP Aceh, sebagai refleksi atas pelaksanaan tanggung jawab institusional..

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, guna memastikan keselarasan kebijakan pusat dan implementasinya di tingkat daerah..

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Aceh tahun 2024 bertujuan sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN untuk mencapai visi dan misi BNNP Aceh.

Tujuan utama dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja dalam kegiatan Program P4GN BNNP Aceh tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan dan strategi BNNP Aceh tahun 2024, guna meningkatkan kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

## C. DASAR HUKUM

---

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

---

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

### 1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh. Adapun tugas Badan Narkotika Nasional sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2014, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Selain melaksanakan tugas yang telah disebutkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif yang terkait dengan tembakau dan alkohol..

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b) Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama;
- c) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d) Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f) Pelayanan administrasi.

### 3. Kewenangan

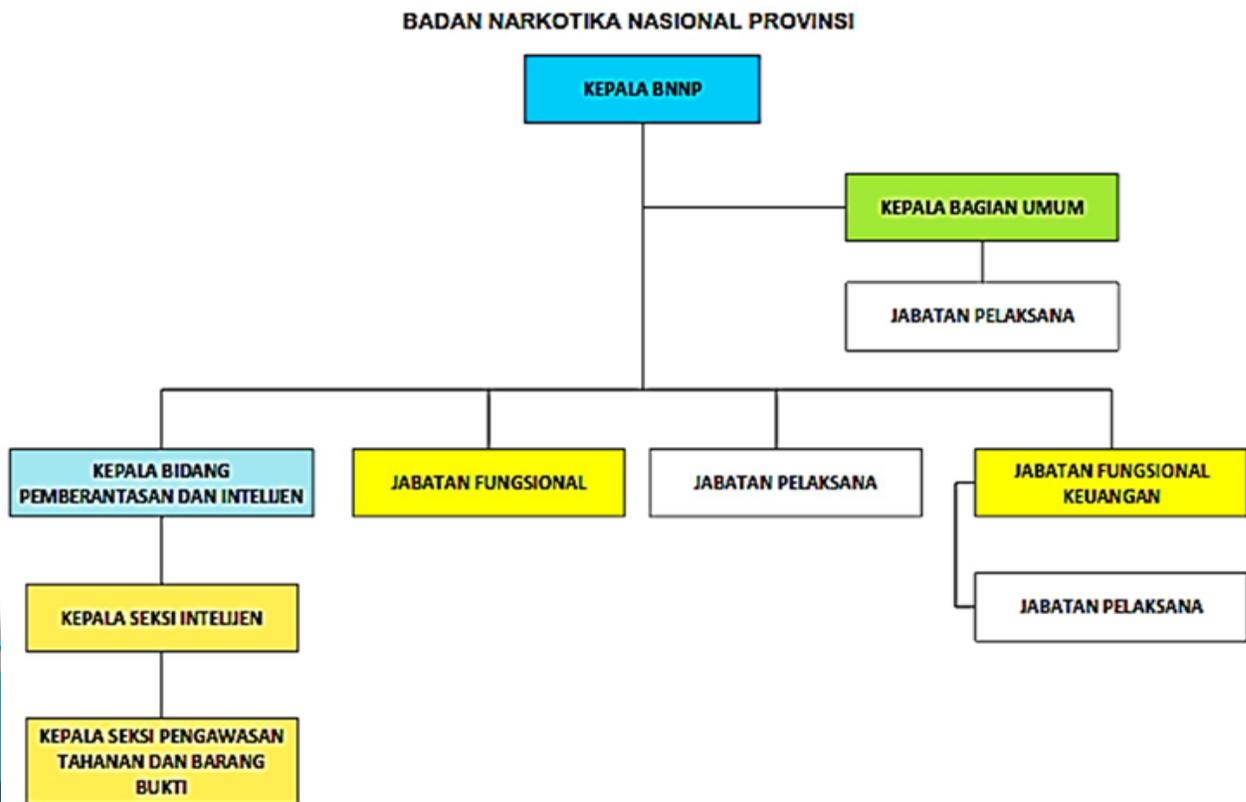
Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayahnya.

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diatur dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/175/II/KA//KP.07.00/2022/BNN Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, terdiri dari:

- A. Kepala;
- B. Bagian Umum;
- C. Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- D. Jabatan Fungsional
- E. Jabatan Pelaksana

Gambar 1  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH



## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

---

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh disusun sebagai berikut :

Bab I    Pendahuluan.

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika Penyajian

Bab II.   Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 - 2024
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III.   Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja
- B. Ringkasan Kinerja
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV.   Penutup

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

#### A. RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) 2020 – 2024

---

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen yang krusial dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses ini, setiap Badan atau Instansi melakukan serangkaian langkah, seperti analisis kebijakan dan perancangan, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang ada atau yang berpotensi muncul dalam organisasi. Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai lembaga pemerintah, telah merumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara pencapaian tersebut. Bab ini akan menguraikan tentang Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 serta Penetapan Kinerja BNN untuk tahun 2024.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/BNN TAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi Aceh.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/BNN Tahun 2010, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya di wilayah Provinsi Aceh.

Sebagai wujud implementasi dari tugas dan fungsi yang dimiliki, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah merumuskan dua program utama, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikitropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN Provinsi Aceh dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

Dalam bagian ini, Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Provinsi Aceh akan diawali dengan uraian mengenai kondisi umum yang mencerminkan capaian kinerja kelembagaan dalam lima tahun mendatang. Selain pencapaian tersebut, aspirasi masyarakat yang semakin dinamis juga menjadi perhatian penting dalam mencapai visi dan misi BNN Provinsi Aceh. Beberapa harapan dari stakeholders yang diperoleh melalui survei kepuasan selama empat tahun terakhir akan dijadikan masukan dalam penyusunan Renproja, dengan fokus pada dimensi pelayanan yang perlu ditingkatkan di masa depan.

Visi dan misi dalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan utama pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional. Untuk mengimplementasikannya, program dan kegiatan di BNN dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (Renproja) 2020-2024 oleh setiap BNN Provinsi sebagai bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan Rencana Program Kerja (RENPROJA) 2020-2024 BNN Provinsi Aceh mengacu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN. Selain itu, dokumen ini juga merujuk pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNN Provinsi Aceh.

**Tabel 1 Target Kinerja BNN Provinsi Aceh 2020 - 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2024	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	95	95	95	96	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Aceh

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2024	2024	
	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Aceh
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	95	95	95	96	
	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	
	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	3	3	4	5	Penanggung Jawab Bidang P2M BNNP Aceh
	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Instansi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	23	10	10	10	10	
	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	74	10	10	10	10	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Jumlah kawasan / wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	5	8	11	13	5	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	15	15	16	16	17	Penanggung Jawab Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh
	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	12	13	14	15	16	
	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	100	100	100	100	100	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2024	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	2	3	4	5	6	Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Aceh
	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P21)	20	20	21	21	22	
	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan, serta kemanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel di atas, BNN Provinsi Aceh berkomitmen mendukung pencapaian sasaran strategis BNN, antara lain: peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk narkoba, peningkatan ketanggapsiagaan masyarakat, penguatan upaya pemulihan pecandu narkoba, serta pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba. Sasaran ini dicapai melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) serta melalui Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (Program Generik) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN Provinsi Aceh.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renproja BNN Provinsi Aceh dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2024 BNN Provinsi Aceh memiliki rencana kinerja tahunan dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Aceh Tahun 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga, Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba</i>	5 Keluarga	40.000.000,-
		<i>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa, Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa</i>	2 Desa	70.000.000,-
2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Skill</i>	2 Lembaga	141,900,000,-

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba</i>	3 Lembaga	257,782,000,-
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitas Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang</i>	3 Kelompok Masyarakat	623,925,000,-
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	<i>Standarisasi Profesi dan SDM, Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan</i>	10 Orang	13,685,000,-
		<i>Sertifikasi Profesi dan SDM, Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis</i>	25 Orang	129,987,000,-
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	<i>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota</i>	50 Orang	70,742,000,-
		<i>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)</i>	438 Orang	62,465,000,-
		<i>Fasilitas Pembinaan Lembaga, Lembaga Rehabilitasi yang Operasional</i>	5 Lembaga	14,377,000,-
		<i>Fasilitas Pembinaan Lembaga, Fasilitas Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota</i>	10 Lembaga	109,310,000,-
		<i>Fasilitas Pembinaan Lembaga (IBM), Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional</i>	2 Lembaga	93,387,000,-
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	<i>Pelayanan Publik kepada masyarakat, Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan</i>	40 Orang	80,190,000,-
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	<i>Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat, Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)</i>	1 Laporan	40.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	<i>Perkara Hukum Perseorangan, Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)</i>	11 Perkara	632,000,000,-
		<i>Operasi Bidang Keamanan, Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)</i>	2 Operasi	281,100,000,-
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	<i>Pelayanan Publik kepada masyarakat, Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)</i>	4 Orang	33,275,000,-
		<i>Pengawasan dan Pengendalian Produk, Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non narkotika (unit Vertikal)</i>	2 Produk	15,310,000,-
		<i>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat, Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)</i>	19 Orang	176,240,000,-
11.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal (Gaji dan Tunjangan), Layanan Perkantoran</i>	12 Layanan	13,859,878,000,-

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal (Keuangan), Layanan Manajemen Keuangan</i>	2 Dokumen	7,742,000,-
12.	Layanan Manajemen SDM Internal, Layanan Manajemen SDM	<i>Layanan Manajemen SDM Internal, Layanan Manajemen SDM</i>	1 Layanan	35,375,000,-
13.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal (REN), Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	2 Dokumen	36,792,000,-
		<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal (REN), Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	2 Dokumen	26,410,000,-
14.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal (Perkantoran), Layanan BMN</i>	1 Layanan	263,000,-
		<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal (Perkantoran), Layanan Umum</i>	1 Layanan	439,328,000,-
	Sarana Prasarana	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal (Perkantoran), Layanan Perkantoran</i>	12 Layanan	2,280,107,000,-
		<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Sarana Internal</i>	18 Unit	77,600,000,-
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Layanan Kehumasan dan Protokoler, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	31,110,000,-

### C. PERJANJIAN KINERJA

Sumber acuan utama bagi BNNP Aceh adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan pada awal tahun 2024 antara BNN RI dan BNNP Aceh. Perjanjian Kinerja ini merupakan kesepakatan formal antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas tersebut, disusun secara berjenjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Dokumen ini merinci target kinerja dalam bentuk nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kegiatan, serta menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi yang dievaluasi di akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja adalah pernyataan atau kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menetapkan target tertentu yang dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia di lingkungan instansi terkait.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Perjanjian Kinerja BNNP Aceh Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/kota
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	10 kabupaten/kota
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah provinsi	10 kabupaten/kota
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	15 kawasan
		Nilai keterpulihan kawasan yang diintervensi	2,4 Indeks
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	110 Orang
		Jumlah petugas rehabilitasi tersertifikasi kompetensi teknis	7 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	22 Unit
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
8	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 &
9.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	0 Peta jaringan
10.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah perkara berkas tindak perkara narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	13 Berkas perkara
		Jumlah titik tanaman ganja dan tanaman lainnya yang dimusnahkan	3 Titik lokasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
11.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
12.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh	86 Indeks
13.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	97,25 Indeks
14.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	10 BNN Kabupaten/Kota
15.	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertical	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### 1. Ringkasan Kinerja

Pada awal tahun anggaran 2024, BNNP Aceh sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan BNNP Aceh, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 15 (lima belas) sasaran kegiatan dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Lima Belas sasaran kegiatan tersebut, meliputi 10 (sepuluh) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk memperkuat/mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum dan 1 sasaran kegiatan untuk pengelolaan reformasi birokrasi (Zona Integritas).

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 4 Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan BNNP Aceh Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/ kota	7 Kabupaten/ kota	90%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	10 kabupaten/ kota	10 kabupaten/ kota	100%
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah provinsi	10 kabupaten/ kota	10 kabupaten/ kota	100%
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	15 kawasan	15 kawasan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Wilayah Narkoba Secara Berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Di intervensi	2.4 Indeks	2.4 Indeks	100%
6.	Meningkatnya Kapasitas Teknis Secara Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
7.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
		Jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di Provinsi	22 Unit	22 Unit	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.29 Indeks	3.6 Indeks	110%
9	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahgunaan dan pencandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan pecandu narkotika yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	68 %	81.32 %	200%
10.	Meningkatnya Pemetaan jaringan Sindikat peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	0 Jaringan	1 Jaringan	100%
11.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika vane P-21	13 Berkas Perkara	30 Berkas Perkara	110%
		Jumlah titik lahan anaman ganja dan tanaman terlarang lainnya vano dimusnahkan	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
12.	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
13.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86 Indeks	99.98 Indeks	115%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/ Kota	100%
14.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.25 Indeks	99.95 Indeks	120%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/ Kota	100%
15.	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	75 Indeks	100%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024, BNN Provinsi Aceh melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di Satker Wilayah Provinsi Aceh, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNP Aceh tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

### SASARAN KEGIATAN I

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja Terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Merujuk kepada Definisi operasional **Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi”** adalah “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika”. Ketahanan diri individu terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika dengan menggunakan *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out* sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika.

**Self regulation** merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. **Assertiveness** adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain. **Reaching out** didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Provinsi Aceh. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan

prioritas nasional di tahun 2024, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

**a. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi, sharing pengalaman, Tanya jawab, praktik, dan presentasi.

**b. Media Kegiatan**

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

**c. Fasilitas**

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

**d. Kepesertaan**

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

**e. Fasilitator**

Fasilitator/ narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

**f. Moderator.**

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

**g. Pengujian Peserta Kegiatan.**

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

**h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian**

1. Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ )
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ )

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) menggunakan aplikasi *Mobile Dektari* terhadap remaja (siswa/ mahasiswa) yang telah dilakukan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektari untuk tahun 2024.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh diatas, dimana 5 Kabupaten/ Kota yang ditargetkan berkategori tinggi pada tahun 2024, ternyata didapatkan realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri.

**Tabel 5 Pengukuran Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba**

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$\Sigma(b/a) \times 100$	$= 5/3 \times 100$ $= 166 \%$	$\Sigma$ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi <b>A</b> = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" <b>B</b> = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"

**Tabel 6 Hasil Pengukuran Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba**

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARI	KATEGORI
1.	BNNP Aceh	52.23	Tinggi
2.	BNNK Sabang	55.47	Sangat Tinggi
3.	BNNK Banda Aceh	55.66	Sangat Tinggi
4.	BNNK Pidie	51.75	Tinggi
5.	BNNK Pidie Jaya	52.04	Tinggi
6.	BNNK Bireuen	48.96	Rendah
7.	BNNK Lhokseumawe	50.47	Tinggi
8.	BNNK Langsa	47.27	Rendah
9.	BNNK Aceh Tamiang	38.79	Sangat Rendah
10.	BNNK Gayo Lues	49.60	Rendah
11.	BNNK Aceh Selatan	51.92	Tinggi
<b>NILAI DEKTARI PROVINSI ACEH</b>		<b>50.38</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber : Deputi Pencegahan BNN RI, 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Diri Remaja Terhadap Narkoba di Wilayah Provinsi Aceh terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu sangat tinggi, tinggi dan rendah. Terdapat 2 (Dua) BNN Kab/Kota yang berkategori sangat tinggi yaitu BNN Kota Banda Aceh dan BNN Kota Sabang Sedangkan 5 BNN Kab/Kota lainnya berkategori tinggi yaitu BNNP Aceh, BNNK Pidie, BNNK Pidie Jaya, BNNK Lhokseumawe dan BNNK Aceh Selatan. serta ada 3 BNN Kab/Kota berkategori rendah yaitu BNNK Gayo Lues, BNNK Langsa dan BNNK Bireun dan 1 Kategori Sangat Rendah Yaitu BNNK Aceh Taminag. Secara keseluruhan klasifikasi nilai Dektari Provinsi Aceh termasuk nilai berkategori tinggi yaitu dengan nilai 50.38.

Pencapaian peningkatan dari Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tidak terlepas dari dukungan Kepala BNNP Aceh didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Program Pencegahan dalam melaksanakan kegiatan Edukasi dan Informasi terhadap ketahanan diri remaja. Peran penyuluh narkoba baik di BNNP Aceh maupun di BNNK Kab/Kota memiliki peran yang sangat strategis didalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh pada tahun 2024 ini. Pencapaian peningkatan realisasi dari target 8 Kab/Kota dan dapat terealisasi menjadi 7 Kab/Kota yang memperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) berkategori sangat tinggi dan tinggi menjadi modal untuk pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh pada tahun 2025 mendatang.

Bila ditahun 2025 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh dengan indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi menjadi 8 Kab/Kota, maka diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :*** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :  
arkoba.

***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :*** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 7 Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi**

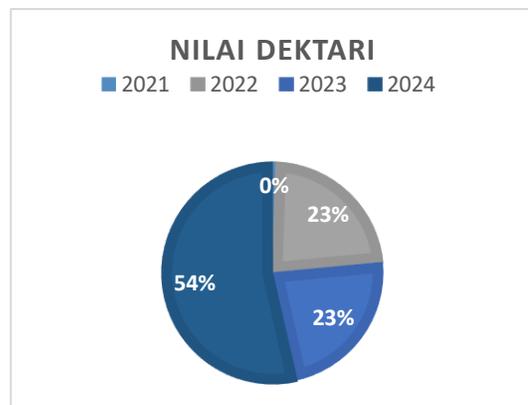
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4 : 3 x 100)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	8 Kab/Kota	7 Kab/Kota	90.5 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target 5 Kabupaten/Kota untuk Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi pada tahun 2024 dapat terealisasi 7 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 90.5%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat

dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu “Indek Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Aceh” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori

“Tinggi” di wilayah provinsi” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 4 Kab/Kota dengan capaian 133% dan pada tahun 2022 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 5 Kab/Kota dengan capaian 166% sedangkan pada tahun 2024 diberikan target 8 Kab/Kota dapat terealisasikan 7 Kab/Kota yang berkategori sangat tinggi dan tinggi.



**Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	7 %	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	8 Kab/Kota	31,67 %	5 Kab/Kota	3 Kab/Kota	7 Kab/Kota

**Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi	5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	140%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 5 Kabupaten/Kota untuk Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 9 Kabupaten/Kota berkategori sangat tinggi dan tinggi dengan persentase capaian 180%.

**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :** Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) antara nilai dektari rata-rata Nasional dengan nilai dektari Provinsi Aceh, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 10 Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Nasional dengan Prov. Aceh TA. 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-rata Dektari Nasional	Nilai Dektari Prov. Aceh	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	53,02	52,23	98,84%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektari Nasional adalah 53,02 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektari Provinsi Aceh adalah 52,23 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Dektari Provinsi Aceh dengan IKK yaitu "Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi" pada tahun 2024 dengan persentase capaian 98,84%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

**1. Kriteria Input**

Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

**2. Kriteria Proses**

- a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.
- b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan.
- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
- d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
- e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan

yang disampaikan oleh peserta.

### 3. Kriteria Output

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.
- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja.
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.
- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

**Tabel 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	180%  Target : 8 Kab/Kota  Realisasi : 7 Kab/Kota	91,09%

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :** Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada didalam gedung/ dikantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam

bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millenial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh nantinya.

## SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap Pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi.

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Merujuk kepada Definisi operasional **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi** adalah situasi dimana keluarga yang menghadapi permasalahan mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun adanya dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pentingnya penguatan ketahanan keluarga juga merupakan salah satu unsur Pembangunan Nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai Garda Terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu :

### **a. Metode Pengukuran**

Setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan disetiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kota/Kabupaten yaitu 10 Kota/Kabupaten (Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2024 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

### **b. Pemilihan Keluarga**

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

### **c. Pemilihan Responden**

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang

Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

**d. Pengisian Kuisisioner**

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan- kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

**e. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian**

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* terhadap desa/ gampong yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2024.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh diatas, dimana 10 Kabupaten/Kota yang ditargetkan berkategori tinggi pada tahun 2024, ternyata didapatkan realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* Provinsi Aceh mencapai 10 Kab/ Kota (100%) yang berkategori sangat tinggi dan tinggi di Provinsi Aceh, dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 12 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”**

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	$\Sigma(b/a) \times 100$	$= 8 / 10 \times 100$ $= 80 \%$	$\Sigma$ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi <b>A</b> = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” <b>B</b> = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”

**Tabel 13 Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2024**

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1.	BNNP Aceh	84.91	Tinggi
2.	BNNK Sabang	95.71	Sangat Tinggi
3.	BNNK Banda Aceh	79.91	Tinggi
4.	BNNK Pidie	81.25	Tinggi
5.	BNNK Pidie Jaya	80.53	Tinggi
6.	BNNK Bireuen	91.49	Sangat Tinggi
7.	BNNK Lhokseumawe	93.48	Sangat Tinggi
8.	BNNK Langsa	86.33	Tinggi
9.	BNNK Aceh Tamiang	94.73	Sangat Tinggi
10.	BNNK Gayo Lues	80.35	Tinggi
11.	BNNK Aceh Selatan	80.45	Tinggi
<b>NILAI DEKTARA PROVINSI ACEH</b>		<b>86.27</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: *Deputi Pencegahan BNN RI, 2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Keluarga Terhadap Narkoba di Wilayah Provinsi Aceh terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, dan rendah. Terdapat 4 (Empat) BNN Kota yang berkategori sangat tinggi yaitu BNN Kota Sabang, BNN Kabupaten Bireuen, BNN Kota Lhokseumawe dan BNN Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dengan kategori tinggi terdapat 6 (Enam) yaitu BNN Kota Banda Aceh, BNN Kabupaten Pidie Jaya, BNN Kabupaten Aceh Selatan, BNN Kabupaten Pidie, BNN Kabupaten Gayo Lues dan BNN Kota Langsa. Secara keseluruhan klasifikasi nilai Dektara Provinsi Aceh termasuk nilai berkategori tinggi yaitu dengan nilai 86,27.

Diharapkan pada tahun 2025 mendatang untuk dapat ditingkatkan sebagaimana mestinya agar pencapaian pada tahun 2024 menjadi sebuah acuan pada kerangka kerja untuk tahun 2025 mendatang, dan dengan hasil tersebut dirasa BNNP Aceh dan jajaran tetap memerlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga fasilitator sebagai Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :**

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 14 Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target yang ditetapkan 10 Kabupaten/Kota untuk Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2024 dapat terealisasi 10 Kabupaten/Kota dengan kategori sangat tinggi dan tinggi dengan capaian persentase 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2021 yaitu “Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 dan 2024 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2022 diberikan target 10 Kab/Kota dapat terealisasi 8 Kab/Kota dengan capaian 80% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 10 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 60%, serta pada tahun 2024 diberikan target 10 Kab/Kota dapat terealisasi 10 Kab/Kota dengan capaian 100%, akan tetapi ditahun 2024 terdapat 4 BNNK yang berkategori sangat tinggi yaitu BNN Kota Sabang, BNN Kota Lhokseumawe ,Kabupaten Bireuen dan BNN Kabupaten Aceh Tamiang.

**Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	10 Institusi /Lemba ga	10 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	8 Kab/kot a	8 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	10 Kab/kota	10 Kab/kota	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 10 Kabupaten/Kota untuk Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 10 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :** Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) antara nilai dektara rata-rata Nasional dengan nilai dektara Provinsi Aceh, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 17 Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Nasional dengan Prov. Aceh TA. 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-rata Dektara Nasional	Nilai Dektara Prov. Aceh	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	85,389	86,271	101,55%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektara Nasional adalah 85,389 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektara Provinsi Aceh adalah 82,271 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Dektara Provinsi Aceh dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi’ pada tahun 2024 dengan persentase capaian 100,55%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Walaupun dapat Meningkatkan dengan signifikan dipandang tetap memerlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

**Tabel 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	100% <b>Target :</b> 10 Kab/Kota <b>Realisasi :</b> 10 Kab/Kota	100%

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran fasilitator sebagai penyuluh narkoba baik di BNNP Aceh maupun di BNNK Kab/ Kota Diharapkan dapat meningkatkan Kompetensi Terutama dibidang penyuluhan dan konseling agar Pencapaian di tahun 2024 tetap dapat dipertahankan pada tahun 2025 mendatang.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :** Dengan memberikan kebebasan berekspreasi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/ di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan remaja akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh nantinya

### SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN terpenuhi sesuai dengan capaian pada indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipatif berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi dengan target pada 10 Kab/Kota. Sesuai dengan yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Definisi operasional Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” adalah Adanya manusia/pelaku/pelaksana (baik tokoh dan penggiat anti narkoba) di suatu lingkungan masyarakat (menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di Lingkungannya

1. Adanya metode dalam Pelaksanaan Program P4GN (Kerjasama Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah).
2. Adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Kegiatan P4GN.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
4. Adanya sistem, regulasi, aturan yang mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat. (Baik Perda, Pergub, Surat Edaran)
5. Adanya kebiasaan hidup sehat *dan teratur* yang telah dilaksanakan oleh keluarga di lingkungan tempat tinggal (berolahraga, interaksi aktif antar anggota keluarga, partisipasi masyarakat, adanya sistem keamanan, dan lainnya).

Berdasarkan target capaian nilai mandiri yang ditetapkan Kedeputusan Dayamas Tahun 2024 sebesar 3.25 atau dengan kategori Mandiri. Target capaian tahun 2024 lebih besar bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 3.15. Hal ini menunjukkan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN.

Menunjukkan bahwa realisasi capaian sasaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 tercapai/ realisasi tercapai 100%. Dimana, 10 Kabupaten Kota mencapai Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 19 Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Seksi Dayamas Satker Wilayah BNNP Aceh 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori	Kriteria
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Pemerintah	3,25	3.32	A	Sangat Mandiri
	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Pendidikan	3,25	0	A	Sangat Mandiri
	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Masyarakat	3,25	3.29	A	Sangat Mandiri
	<b>TOTAL</b>	<b>3,25</b>	<b>3,31</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

Sumber: Deputi Dayamas BNN RI

Sedangkan akumulasi secara umum untuk jajaran di BNN Provinsi Aceh di 10 wilayah Kabupaten/Kota juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan kategori Sangat Mandiri dan Mandiri. Dimana capaian secara keseluruhan melebihi dari target nasional yakni 3.25. Dimana kriteria sangat mandiri dicapai oleh BNNP Aceh dengan Nilai IKP 3,31; BNNK Sabang dengan nilai IKP 3,81; dan BNNK Banda Aceh mencapai nilai IKP 3,66; BNNK Pidie Jaya dengan nilai IKP 3,62; BNNK Bireuen dengan Nilai IKP 3,50; BNNK Lhokseumawe dengan nilai IKP 3,76; BNNK Langsa dengan nilai 3,73; BNNK Tamiang dengan nilai IKP 3,70;. Sedangkan dengan kriteria mandiri dicapaian oleh BNNK Pidie dengan nilai IKP 3,46; BNNK Gayo Lues dengan nilai IKP 3,43.

**Tabel 20 Akumulasi Hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh**

No.	INSTANSI/ SATKER	LINGKUNGAN KERJA	NILAI IKP	KATEGORI	KRITERIA	TOTAL IKP	KATEGORI	KRITERIA	
1	BNNP ACEH	1	Pemerintah	3.32	A	SANGAT MANDIRI	3.31	A	SANGAT MANDIRI
		2	Masyarakat	3.29	A	SANGAT MANDIRI			
2	BNNK SABANG	1	Pemerintah	3.82	A	SANGAT MANDIRI	3.81	A	SANGAT MANDIRI
		2	Pendidikan	3.76	A	SANGAT MANDIRI			
3	BNNK BANDA ACEH	1	Pemerintah	3.47	A	SANGAT MANDIRI	3.66	A	SANGAT MANDIRI
		2	Pendidikan	3.84	A	SANGAT MANDIRI			
4	BNNK PIDIE	1	Pemerintah	3.44	A	SANGAT MANDIRI	3.46	A	SANGAT MANDIRI
		2	Pendidikan	3.48	A	SANGAT MANDIRI			
5	BNNK PIDIE JAYA	1	Pemerintah	3.59	A	SANGAT MANDIRI	3.62	A	SANGAT MANDIRI
		2	Masyarakat	3.64	A	SANGAT MANDIRI			
6	BNNK BIREUEN	1	Pemerintah	3.27	A	SANGAT MANDIRI	3.32	A	SANGAT MANDIRI
		2	Pendidikan	3.37	A	SANGAT MANDIRI			
7	BNNK LHOKSEUMAWA	1	Pemerintah	3.84	A	SANGAT MANDIRI	3.76	A	SANGAT MANDIRI
		2	Pendidikan	3.68	A	SANGAT MANDIRI			

No.	INSTANSI/ SATKER	LINGKUNGAN KERJA	NILAI IKP	KATEGORI	KRITERIA	TOTAL IKP	KATEGORI	KRITERIA
8	BNNK LANGSA	1	Pemerintah	3.67	A	3.73	A	SANGAT MANDIRI
		2	Masyarakat	3.78	A			
9	BNNK ACEH TAMIANG	1	Pemerintah	3.72	A	3.70	A	SANGAT MANDIRI
		2	Pendidikan	3.67	A			
10	BNNK GAYO LUES	1	Pendidikan	3.49	A	3.43	A	SANGAT MANDIRI
		2	Masyarakat	3,37	A			
11	BNNK ACEH SELATAN	1	Pemerintah	3.33	A	3.31	A	SANGAT MANDIRI
		2	Masyarakat	3.28	A			
<b>TOTAL</b>			<b>74.61</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>	<b>37.31</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>
<b>NILAI RATA-RATA</b>			<b>6.78</b>			<b>3.39</b>		

Sumber: Deputi Dayamas BNN RI

Dari gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa dari semua lingkungan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat anti narkoba di wilayah kerja BNN Provinsi Aceh terbukti memenuhi target Mandiri (Skala 3,39), bahkan secara akumulatif sangat Mandiri dengan capaian program 100%.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 10 Kabupaten/Kota yang ditargetkan berkategori mandiri pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi sesuai target yaitu 10 Kab/ Kota (100%) yang berkategori mandiri di Provinsi Aceh, dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 21 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri"**

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	$\sum(b/a) \times 100$	$= 10 / 10 \times 100$ $= 100 \%$	$\sum$ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi <b>A</b> = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" <b>B</b> = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri"

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut** : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 22 Pencapaian Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja yang diberikan pada tahun 2024 sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri di Wilayah Provinsi Aceh dapat terealisasi sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, untuk IKK pada Tahun 2022 dan 2023 Badan Narkotika Nasional dapat Mencapai Target Sesuai dengan Perjanjian Kinerja namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlu adanya Perubahan Dalam Pembinaan Penggiat P4GN Sehingga Minat Masyarakat Untuk Menjauhi Narkoba Lebih Meningkat Terutama untuk Tahun 2025 Mendatang
2. Adanya Partisipasi dari Gerakan Masyarakat Untuk menciptakan kesadaran diri akan bahayanya narkoba pada daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu Masyarakat yang ada pada Lingkungan Tersebut.
3. Menimbang pentingnya Pengaruh Pemerintahan Desa tentang penanggulangan Ancaman bahaya Narkotika Pada Daerah tersebut.

**Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	10 Kab/ Kota							

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri"**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 10 Kabupaten/Kota untuk Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 10 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :** Dalam hal melakukan perbandingan dengan standar nasional dapat dibandingkan dari hasil pengukuran nilai indeks Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba (KOTAN) tahun 2024 dengan Provinsi Aceh, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 25 Perbandingan Realisasi Nilai Indeks KOTAN Nasional dengan Prov. Aceh TA. 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-rata Indeks KOTAN Nasional (Skala 1-4)	Nilai Indeks KOTAN Prov. Aceh (Skala 1-4)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya kesadaran dan Keperdulian masyarakat dalam Penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3.00	3.06	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari nilai indeks Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba (KOTAN), untuk Realisasi Nilai KOTAN Nasional adalah 3,00 dan untuk Realisasi Indeks KOTAN Provinsi Aceh adalah 3,06 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori TANGGAP, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Indeks Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba (KOTAN) di wilayah provinsi pada tahun 2024 dengan persentase capaian 100%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Keterbatasan SDM dalam hal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

**Tabel 26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri"**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesadaran dan Kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100% <b>Target : 10 Kab/Kota</b> <b>Realisasi : 10 Kab/Kota</b>	100%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,47%. Efisiensi tersebut di peroleh melalui Instruksi Surat Edaran Nomor

#### **A. Faktor Keberhasilan**

1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran lingkungan terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan melalui sosialisasi baik tatap muka dan media cetak.
2. Meningkatnya permintaan kegiatan deteksi narkoba yang banyak dilakukan baik di lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) yang telah membiayai sendiri/mandiri kegiatan tersebut.
3. Meningkatnya respon Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Hal itu dengan lahirnya Qanun No.8 tahun 2018, dan Surat Edaran Gubernur No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Bersih Narkoba.
4. Meningkatnya peran serta BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba hal ini dibuktikan dengan capaian Inpres yang menduduki peringkat kedua nasional.

#### **B. Faktor Hambatan**

Adanya faktor hambatan yang dihasilkan pada capaian program kerja dan anggaran tahun 2022. Kondisi yang terjadi hanya hambatan yang diakibatkan karena kondisi Pandemi sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan berhimpun orang. Namun,

dengan penerapan izin, dan prosedur proses yang ketat maka kegiatan dapat berlangsung. ***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut*** : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

#### SASARAN KEGIATAN IV

Meningkatkan Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah rawan Narkoba secara berkelanjutan

Sasaran kegiatan *meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan* terimplementasikan melalui indikator ***Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”***.

Definisi operasional **kawasan rawan narkoba** adalah wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya aktivitas madat narkoba, penjualan, barang bukti, dan kasus kejahatan narkoba yang diungkap oleh penegak hukum. Selain itu, wilayah kawasan rawan narkoba juga menjadi jalur edar dan kejahatan narkoba. Serta kondisi sosial masyarakatnya di suatu kawasan.

**Indikator atau ukuran Kawasan Rawan Narkoba di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”** ditentukan oleh nilai yang dihasilkan dari 8 faktor Utama dan 5 Faktor Pendukung yaitu:

##### A. Faktor Utama

1. *Adanya Kasus Kejahatan Narkoba*
2. *Angka Kriminalitas/Kekerasan yang terjadi di masyarakat*
3. *Adanya Bandar/Pengedar Narkoba*
4. *Adanya Pengguna Narkoba*
5. *Adanya Kegiatan Poduksi Narkoba*
6. *Adanya Barang Bukti Narkoba*
7. *Adanya Entry Point /Pintu Masuk*
8. *Adanya Kurir Narkoba*

##### B. Faktor Pendukung

1. Banyak Tempat Hiburan
2. Tempat Kost dan Hunian dengan Privacy Tinggi
3. Tingginya Angka Kemiskinan
4. Ketiadaan Sarana Publik
5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat

Sebuah kawasan dinyatakan berubah status atau dinyatakan pulih melalui proses pengukuran dengan menggunakan kuisioner **Indikator Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR)** yang variabel pertanyaannya memuat indikator diatas.

Dimana pelaksanaan, kuisioner dilakukan diawal sebelum **pemberian intervensi** dan **setelah proses kegiatan pembinaan atau intervensi** dilakukan di kawasan rawan tersebut. Dalam mengukur indeks keterpulihan suatu wilayah melalui dua variabel, yaitu: (1) tingkat keterpulihan dan (2) tingkat keberhasilan program. Dengan kedua variabel tersebut kondisi kerawanan Narkoba di suatu wilayah dapat diukur tingkat perubahannya, setelah diintervensi dengan program pemberdayaan alternatif.

Sebuah kawasan dinyatakan berubah stastusnya setelah hasil akhir pada kuisioner jika hasil pengukuran menunjukkan adanya perubahan pada 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung. Dimana mekanisme pengumpulan nilai digunakan teknik wawancara dari identifikasi variabel yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban pilihan dan terbuka (ditulis). Jumlah 20 pertanyaan mewakili setiap indikator pengukuran 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara terpisah, yaitu: pengumpulan primer (wawancara dengan minimal 5 orang masyarakat yang dibina) dan pengumpulan sekunder (dengan wawancara dan pencatatan sumber data, baik kepolisian dan kantor pemerintah. Setelah dilakukan proses tersebut maka dihasilkan nilai akhir yang akan memuat sesuai dengan kategorinya seperti data dibawah ini.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKK	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

**Tabel 27 Data Keterpulihan Kawasan Rawan Narkotika Di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2024**

NO.	NAMA SATKER	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	STATUS KERAWANAN	NILAI IKKR	KATEGORI KETERPULIHAN	NILAI KEWIRAU SAHAAN	KATEGORI
1.	BNNP ACEH	Desa Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar	Budidaya Tanaman dengan Sistem Hidroponik	BAHAYA	2.48	WASPADA	2.72	BAIK
		Desa Lampanah Ineu, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar	Budidaya Tanaman dengan Sistem Hidroponik	BAHAYA	2.34	WASPADA	2.16	CUKUP
		Desa Pulo, Kec. Seulimuem, Kab. Aceh Besar	Budidaya Ikan Nila dengan Sistem Bioflok	BAHAYA	2.31	WASPADA	2.36	CUKUP

NO.	NAMA SATKER	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	STATUS KERAWANAN	NILAI IKKR	KATEGORI KETERPULIHAN	NILAI KEWIRAU SAHAAN	KATEGORI
2.	BNNK BIREUEN	Desa Cot Geureudong, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen	Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Gill Net	WASPADA	2.87	SIAGA	2.51	BAIK
		Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen	Pelatihan Pembuatan Sabun	WASPADA	2.77	SIAGA	2.64	BAIK
		Desa Cot Trieng, Kec. Kuala, Kab. Bireuen	Pelatihan Menjahit	WASPADA	2.82	SIAGA	2.73	BAIK
		Desa Batee Raya, Kec. Juli, Kab. Bireuen	Pelatihan Menjahit	WASPADA	3.09	SIAGA	2.77	BAIK
		Desa Geudong Alue, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen	Pelatihan Service AC	WASPADA	3.18	SIAGA	2.66	BAIK
		Desa Tingkem Mayang, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen	Pembuatan Sabun Cair	WASPADA	3.02	SIAGA	2.75	BAIK
3	BNNK GAYO LUES	Desa Raklung, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues	Pembuatan Kerupuk Opak	WASPADA	3.22	SIAGA	3.25	BAIK
		Desa Umelah, Desa Blang Pegayon, Kab. Gayo Lues	Pakan Ikan	WASPADA	3.02	SIAGA	3.37	SANGAT BAIK
		Desa Kenyaran, Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues	Pelatihan Kopi Instan	WASPADA	3.12	SIAGA	3.4	SANGAT BAIK
		Desa Ramung, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues	Pembuatan Pupuk Organik	WASPADA	3.2	SIAGA	3.3	SANGAT BAIK
		Desa Gajah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues	Pembuatan Pupuk Organik	WASPADA	3.39	AMAN	3.42	SANGAT BAIK
4	BNNK LHOKSEU MAWE	Desa Teupin Reusep, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	Pembuatan Emping Jagung	BAHAYA	2.01	WASPADA	2.1	CUKUP
		Desa Riseh Tunong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	Pembuatan Emping Jagung	BAHAYA	2.36	WASPADA	2.4	CUKUP
		Desa Blang Banyak, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	Pembuatan Emping Jagung	BAHAYA	2.47	WASPADA	3.1	BAIK
		Desa Sawang, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	Pembuatan Emping Jagung	BAHAYA	2.22	WASPADA	2	CUKUP
<b>TOTAL</b>					49.89	<b>SIAGA</b>	49.64	<b>BAIK</b>
<b>NILAI RATA-RATA</b>					<b>2.77</b>		<b>2.76</b>	

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 15 kawasan rawan di Wilayah Provinsi Aceh yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga” pada tahun 2024, dari 4 Kabupaten yang diintervensi dapat terealisasi 11 kawasan yang beralih ke status Siaga dengan persentase 73,33%, dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 28 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”**

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”	$\sum(b/a) \times 100$	$= 15 / 11 \times 100$ $= 73,33 \%$	$\sum$ = Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga” <b>A</b> = Jumlah target kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga” <b>B</b> = Jumlah realisasi kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut .

**Tabel 29 Pencapaian Kinerja kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	15 Kawasan	15 Kawasan	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target yang diberikan pada tahun 2024 sebanyak 15 kawasan dengan jumlah kawasan rawan diwilayah provinsi yang beralih status dari Waspada menjadi Siaga dapat terealisasi sebanyak 15 kawasan dengan persentase capaian 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu “Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dibandingkan karena IKK nya

sama yaitu "Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga" maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2024 sebanyak 15 kawasan dengan jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Waspada menjadi Siaga dapat terealisasi sebanyak 11 kawasan dengan persentase capaian 73,33%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 statusnya dari "Bahaya" menjadi "Waspada" sedangkan untuk target 2022 sebanyak 15 kawasan dengan jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada dapat terealisasi sebanyak 16 kawasan dengan persentase capaian 107%.

**Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	8 Kawa san	15 Kawa san	15 Kawa san	15 Kawa san	9 Kawa san	16 Kawa san	11 Kawa san	15 Kawa san

**Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :**

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	5 Kawasan	15 Kawasan	220%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 5 kawasan untuk Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 15 Kawasan dengan persentase capaian 220%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Keterbatasan SDM dalam hal

pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

**Tabel 32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “waspada” menjadi “siaga” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	100% <b>Target</b> : 15 Kab/Kota <b>Realisasi</b> : 15 Kab/Kota	100%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 100%. Efisiensi tersebut di peroleh melalui beberapa analisa yakni:

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut :** Adanya manusia/pelaku/pelaksana di lingkungan masyarakat yang menjadi figur dan mampu menyuarakan serta mengajak untuk berbuat dalam program P4GN di dalam maupun diluar lingkungannya, serta adanya metode atau sinergitas dalam pelaksanaan program P4GN antara BNNP/BNNK satker wilayah provinsi Aceh dengan instansi/lembaga Pemerintah Daerah

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai berikut :** Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

## SASARAN KEGIATAN V

“Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Wilayah Narkoba Secara Berkelanjutan”

Dalam Sasaran ini Yang dinilai adalah **Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi**. Definisi operasional **kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”** adalah dengan bergesernya capaian nilai IKKR (Indikator Keterpulihan Kawasan Rawan) melalui pengukuran yang dilakukan setelah pelaksanaan program. Dimana pengukuran dilakukan kepada masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan di Gampong dalam 4 Kabupaten seperti dalam tabel diatas. Kondisi ini berbeda dengan capaian atau target tahun lalu dimana yang membedakannya adalah statusnya dan menjadi ukuran nilai IKKR dalam Perjanjian Kinerja BNNP Aceh. Untuk nilai indeks capaian dari target 2,73, BNNP Aceh dan jajaran berhasil mencapai nilai indeks dengan realisasi 2,77 dengan persentase 101,4%.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 2,4 indeks untuk Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2024, dapat terealisasi melebihi target yaitu 3,77 untuk nilai indeks (101%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 33 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi wilayah Provinsi Aceh**

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	$\sum(b/a) \times 100$	$= 3,27 / 2,6 \times 100$ $= 107 \%$	$\sum$ = Jumlah Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi <b>A</b> = Jumlah target Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi <b>B</b> = Jumlah realisasi Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut** : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 34 Pencapaian Kinerja Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,4	21.40	200%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target yang diberikan pada tahun 2024 sebesar 2,73 indeks dengan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi, dapat terealisasi sebanyak 21,40 indeks dengan persentase capaian 200%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 tidak bisa dibandingkan karena tidak ada IKK terkait indeksnya. Sedangkan



pada tahun 2021, 2022 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “*nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi*” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2024 dengan nilai indeks sebesar 2,73 dengan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi, dapat terealisasi sebesar 2,77 dengan persentase capaian 101%. Sedangkan pada tahun 2022 dengan indeks sebesar 2,6 dengan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi, dapat terealisasi sebesar 3,27 dengan persentase capaian 126%.

**Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2.7 Indeks	2,6 Indeks	2,73 Indeks	2,4 Indeks	2.9 Indeks	3.27 Indeks	2.77 Indeks	21,40 Indeks

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :**

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 36 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	0	21.40	200%

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

- a. Hubungan yang baik dengan target institusi/ lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan program P4GN yang dilakukan oleh Satkerwil BNNP Aceh.
- b. Adanyanya peran dari partisipasi masyarakat dalam ikut bersama-sama mengurangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Aktifnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba baik di institusi maupun di kelompok masyarakat walaupun dengan keterbatasan SDM dalam hal penyebaran informasi ini.
- d. Dukungan dan Kerjasama dari stakeholder swasta dalam ikut berperan serta dalam pembinaan kawasan rawan di provinsi Aceh.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

- a. Advokasi di tingkat pengambilan kebijakan lebih dimaksimalkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan ketercapaian program P4GN di daerah bisa lebih maksimal dengan berpedoman pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Memperkuat sinergi antar instansi baik dengan instansi pusat, instansi pemerintah daerah, dunia usaha/swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih dipertajam dan mendalam dari sebelumnya.
- c. Lebih aktif dalam mensosialisasikan P4GN sehingga pembangunan berwawasan anti narkoba dapat direalisasikan keseluruh pelosok diwilayah Aceh.

## **SASARAN KEGIATAN VI**

**“Meningkatnya kapasitas tenaga teknis Rehabilitasi”**

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

### **1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.**

Definisi operasional **petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih** adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 110 orang Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih wilayah Provinsi Aceh

pada tahun 2023, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu 67 orang (106%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 37 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih wilayah Provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Org)
1.	BNNP Aceh	10
2.	BNNK Sabang	10
3.	BNNK Banda Aceh	10
4.	BNNK Pidie	10
5.	BNNK Pidie Jaya	10
6.	BNNK Bireuen	10
7.	BNNK Lhokseumawe	10
8.	BNNK Langsa	10
9.	BNNK Aceh Tamiang	10
10.	BNNK Gayo Lues	10
11.	BNNK Aceh Selatan	10
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH</b>		<b>110</b>

**Tabel 38 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih wilayah Provinsi Aceh**

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$\sum(b/a) \times 100$	= 109/10 x 100 = 99,09 %	$\sum$ = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih <b>A</b> = Jumlah target petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih <b>B</b> = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 39 Pencapaian Kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	110 Orang	110,09%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu untuk target 10 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang akan di latih dan dapat terealisasi 109 orang dengan capaian persentase 100% untuk satker wilayah BNN Provinsi Aceh.



**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini adalah sebagai berikut** : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2021 yaitu terdapat perubahan beberapa indikator yang mengubah target yang beberapa tahun jadi terdapat sedikit perbedaan perhitungan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022

dan 2023 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2024 ditetapkan yaitu 10 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang akan di latih, dan dapat terealisasi 109 orang atau dengan capaian persentase 100%. Sedangkan pada tahun 2023 ditetapkan yaitu 110 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang akan di latih dapat terealisasi 67 orang atau dengan persentase capaian 106%.

**Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	53 Orang	63 Orang	110 Orang	109 Orang	78 Orang	67 Orang	109 Orang	110 Orang

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi** : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	17 Orang	110 Orang	641%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 17 orang untuk Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 109 orang dengan persentase capaian 641%.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba
2. Terbatasnya SDM di klinik pratama di BNNP dan BNN Kab/Kota Provinsi Aceh

**Tabel 44. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100% Target : 10 Orang Realisasi : 10 Orang	2,71%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,71%.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota di Aceh tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota Aceh.
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
4. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat

terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

## 2. Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis.

Definisi operasional **petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis** adalah Petugas rehabilitasi adiksi yang sudah lulus dari uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 7 orang Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata tidak dapat terealisasi dikarenakan untuk kegiatan ini terjadi pemblokiran anggaran, dan realisasi target masih 0 orang (0%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 41 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis wilayah Provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Org)
1.	BNNP Aceh	10
2.	BNNK Banda Aceh	10
3.	BNNK Pidie	10
4.	BNNK Pidie Jaya	10
5.	BNNK Bireuen	10
6.	BNNK Lhokseumawe	10
7.	BNNK Langsa	10
8.	BNNK Aceh Tamiang	10
9.	BNNK Gayo Lues	10
10.	BNNK Aceh Selatan	10
11.	BNNK Sabang	10
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH</b>		<b>110</b>

**Tabel 42 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis wilayah Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	$= \frac{\sum(b)}{a} \times 100$	$= \frac{0}{7} \times 100$ = 0 %	$\sum$ = Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi Teknis <b>A</b> = Jumlah total anggaran pembiayaan petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi Teknis <b>B</b> = Jumlah total penyerapan pembiayaan petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi Teknis

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 43 Pencapaian Kinerja Jumlah petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi kompetensi teknis**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah petugas Penyelenggara IBM yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis tidak dapat terealisasi karena terjadi pemblokiran anggaran, dari target yang telah ditetapkan dengan target sebanyak 10 Orang dan capaian yang diperoleh sebesar 10 orang dengan persentase capaian sebesar 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 dan 2024 karena



berbeda Metode Penilaian Pada Target. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2024 dapat terdapat beberapa faktor yang mengubah sistem penilaian IKK pada Petugas Rehabilitasi maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2024 ditetapkan yaitu jumlah petugas Rehabilitasi yang terlatih melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan target sebanyak 7 Orang dan capaian yang diperoleh sebanyak 0 orang dengan persentase capaian sebesar 0%. Sedangkan pada tahun 2022 petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis juga melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan target sebesar 5 Orang dan capaian yang diperoleh sebesar 14 orang dengan persentase capaian sebesar 280%.

**Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah petugas IBM Yang Terlatih	5 Orang	5 Orang	5 Orang	10 Orang	8 Orang	14 Orang	0 Orang	10 Orang

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi i 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = (5 : 4 \times 100)$
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi IBM Yang terlatih	17 Orang	10 Orang	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 17 orang untuk Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi, tidak dapat terealisasi dikarenakan terjadi pemblokiran anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2024 yaitu masih 0 orang dengan persentase capaian 0%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dan Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi

dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika

**Tabel 46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah petugas Penyelenggara IBM Yang Terlatih	10% <b>Target :</b> 10 Orang <b>Realisasi :</b> 10 Orang	0%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut terjadi pemblokiran anggaran sehingga tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh
2. Adanya keinginan dari petugas rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang rehabilitasi dan tersertifikasi sesuai kompetensi yang harus dimiliki.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Menciptakan petugas-petugas rehabilitasi yang kompeten dibidangnya dalam penanganan pecandu narkotika
2. Petugas-petugas rehabilitasi mempunyai legalitas dalam menjalankan tugasnya.
3. Meningkatkan pengetahuan SDM dibidang rehabilitasi melalui pelatihan penanganan pasien penyalahgunaan narkotika.

## SASARAN KEGIATAN VII DAN VIII

“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitasi Layanan Rehabilitasi Narkotika”

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

**3. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi**

Definisi operasional **lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah : Definisi operasional lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Lembaga rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba agar Lembaga rehabilitasi yang menyediakan layanan rehabilitasi yang mampu memenuhi target standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai standar layanan minimal (SPM) bagi klinik yang berada di bawah BNN, BNNP dan BNNK.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana diberikan target 11 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi melebihi target yaitu 16 orang (145%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 47 Data capaian indikator kinerja kegiatan lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Lbg)
1.	BNNP ACEH dan BNNK Jajaran	24 Lembaga
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH</b>		<b>24 Lembaga</b>

**Tabel 48 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	$= \frac{\sum(b/a)}{100} \times 100$	$= \frac{11}{17} \times 100$ $= 145\%$	$\Sigma$ =Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi <b>a</b> =Jumlah total target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi <b>b</b> =Jumlah total capaian lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut** : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 49 Pencapaian Kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga	24 Lembaga	210%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh Pada tahun 2024 jumlah lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan target sebesar 2 lembaga dan capaian yang diperoleh sebesar 24 lembaga dengan persentase capaian sebesar 210%.



**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu “Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat

yang operasional” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2024 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal(SPM) di wilayah provinsi” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2024 ditetapkan yaitu jumlah lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan target sebesar 11 lembaga dan capaian yang diperoleh sebesar 16 lembaga dengan persentase capaian sebesar 145%. Sedangkan Pada tahun 2022 dengan target sebesar 3 lembaga dan capaian yang diperoleh sebesar 10 lembaga dengan persentase capaian sebesar 300%.

**Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Fasilitas	3 Lembaga	11 Lembaga	2 Lembaga	3 Fasilitas	3 Lembaga	10 Lembaga	2 Lembaga

**Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	16 Lembaga	16 Lembaga	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 16 lembaga untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 16 lembaga dengan persentase capaian 100%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dan Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika serta Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

**Tabel 52 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	145% <b>Target : 11</b> Lembaga <b>Realisasi : 16</b> Lembaga	51,34%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 51,34%.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Adanya sosialisasi dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjadikan klinik pratama BNNP/BNNK dan lembaga rehabilitasi IP dan KM agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
2. Adanya keinginan dari klinik Pratama BNNP, BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM untuk mencapai Standar Layanan Minimal.
3. Menjadikan Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM yang terstandar sehingga kedepannya bisa mencapai Standar Nasional Indonesia.
4. Proses pemenuhan persyaratan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya yang relatif lambat dapat menghambat pemenuhan layanan rehabilitasi berstandar minimal yang ditetapkan.
5. SDM yang harus terpenuhi pada Standar Pelayanan minimal (SPM) harus melalui beberapa proses, sehingga penetapan SPM pada Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi terhambat.
6. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk melakukan asistensi ke daerah secara langsung.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba
2. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
3. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya adalah izin legalitas baik itu pendirian gedung maupun izin operasional yang terkendala di beberapa klinik pratama BNNK baik habis masa berlaku maupun sedang dalam proses perpanjangan.

***4. Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi***

Definisi operasional **unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)** adalah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kalangan masyarakat itu sendiri

pada wilayah tempat tinggalnya dengan para petugas yang telah terlatih dan berkompeten dalam menangani korban penyalhguna narkoba pada wilayahnya.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 22 unit Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2024 yang diberikan target, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu 23 unit (104%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 53 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Unit)
1.	BNNP ACEH	2
2.	BNNK SABANG	2
3.	BNNK BANDA ACEH	5
4.	BNNK PIDIE	2
5.	BNNK PIDIE JAYA	2
6.	BNNK BIREUEN	3
7.	BNNK LHOKSEUMAWE	2
8.	BNNK LANGSA	2
9.	BNNK ACEH TAMIANG	2
10.	BNNK GAYO LUES	2
11.	BNNK ACEH SELATAN	2
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH</b>		<b>26</b>

**Tabel 54 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	$= \frac{\sum(b)}{a} \times 100$	$= \frac{23}{22} \times 100$ $= 104 \%$	$\Sigma$ =Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi <b>a</b> =target unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi <b>b</b> =realisasi unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 55 Pencapaian Kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	23 Unit	24 Unit	105%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh Target dan realisasi kinerja unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional pada tahun 2024 adalah sebanyak 22 unit dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 23 unit IBM dan capaian yang diperoleh sebesar 105%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu “Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2024 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2024 dan ditetapkan unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional sebanyak 22 unit dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 23 unit IBM dan capaian yang diperoleh sebesar 104%. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 17 unit dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 15 unit IBM dan capaian yang diperoleh sebesar 105%.

**Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Fasilitas	22 Unit	17 Unit	22 Unit	10 Fasilitas	18 Unit	15 Unit	23 Unit

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	16 Unit	23 Unit	143,75%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 16 unit untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 23 unit dengan persentase capaian 143,75%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dan Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba serta Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

**Tabel 57 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	100% <b>Target :</b> 23 Unit <b>Realisasi :</b> 23 Unit	100%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 100%

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti perangkat kecamatan, puskesmas perangkat desa serta kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3. Keinginan dan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan

rehabilitasi

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga rehabilitasi dan perlakuan sosial masyarakat terhadap pecandu narkoba
5. Salah satu kendala yang di hadapi di lapangan adalah adanya beberapa komponen desa yang resisten terhadap program-program rehabilitasi.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikut sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh dan dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien.

## SASARAN KEGIATAN IX

“Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkoba”

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

### **1. *Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh***

***Definisi operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi*** adalah : Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Provinsi Aceh dan BNNK/Kab yang ada di wilayah Aceh melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana nilai indeks 3,2 untuk Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2022, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu dengan nilai indeks 3,67 (114%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 58 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Indeks)
1.	BNN Provinsi Aceh	3,6
2.	BNN Kota Banda Aceh	3,68
3.	BNN Kabupaten Pidie	3,47
4.	BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,76
5.	BNN Kabupaten Bireuen	3,6
6.	BNN Kabupaten Lhokseumawe	3,56
7.	BNN Kota Langsa	3,84
8.	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3,85
9.	BNN Kabupaten Gayo Lues	3,65
10.	BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,51
11.	BNN Kota Sabang	3,6
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH</b>		<b>3,67 Indeks IKM</b>

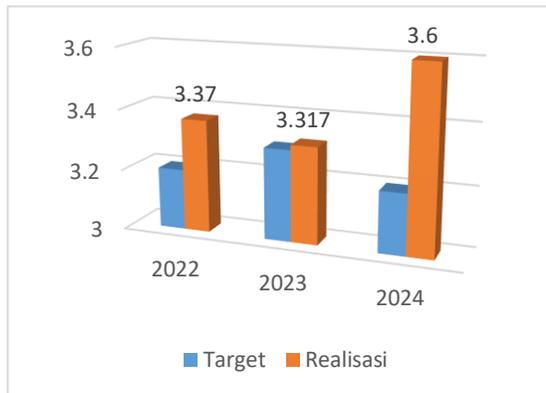
**Tabel 59 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh	$= \frac{\sum(b/a) \times 100}{100}$	$= 3,67 / 3,2 \times 100\%$ $= 114\%$	$\Sigma$ =Jumlah indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh <b>a</b> =target indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh <b>b</b> =realisasi indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh

**Tabel 60 Pencapaian Kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh	3,2	3,6	114%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh target dan realisasi kinerja untuk Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah sebanyak 3,2 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,67 indeks kepuasan layanan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 114%.



**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :**

Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu “Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu

narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2024 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan, pada tahun 2024 ditetapkan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh adalah sebanyak 3,2 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,67 indeks kepuasan layanan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 114%. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 3,3 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,317 indeks kepuasan layanan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 101%.

**Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi**

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2024
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh	100 Orang	3,2 Indeks	3,3 Indeks	3,2 Indeks	81 Orang	3,37 Indeks	3,317 Indeks	3,6 Indeks

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 62 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh  
Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh	16 Unit	23 Unit	143,75%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 16 unit untuk Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 23 unit dengan persentase capaian 143,75%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat, dan Kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

**Tabel 63 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh  
Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh	114% <b>Target :</b> 3,2 Indeks <b>Realisasi :</b> 3,6 Indeks	27%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Wilayah Aceh telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiediaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan quisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Waktu pengisian quisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi kendala utama.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :*** Mengikuti sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

## SASARAN KEGIATAN X

“Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika”

Suatu rangkaian langkah strategis, terencana, dan terintegrasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas program pemulihan bagi pecandu narkotika. Upaya ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial, penguatan kerjasama lintas sektor, penghapusan stigma sosial terhadap pecandu, serta memastikan keberlanjutan pemantauan pasca-rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi sosial dan mencegah kekambuhan (*relapse*). Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan pecandu agar dapat kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya khas Aceh.

Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan, faktor keberhasilan, dan kekurangan terkait kegiatan ini, khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh:

### **Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Upaya Pemulihan antara Lain :**

1. Penguatan Program Rehabilitasi
2. Menyediakan layanan rehabilitasi berbasis medis dan sosial.
3. Memperbanyak pusat rehabilitasi di wilayah yang sulit dijangkau.
4. Meningkatkan kapasitas tenaga rehabilitasi, seperti konselor, dokter, dan psikolog.
5. Pendekatan Komunitas
6. Mengalakkan program community-based treatment and rehabilitation (CBTR).
7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyalahguna selama masa pemulihan.
8. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi
9. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya pemulihan.

10. Menghapus stigma terhadap pecandu sebagai pelaku kriminal.
11. Kerjasama Lintas Sektor
12. Mengintegrasikan upaya BNNP dengan lembaga lain, seperti pemerintah daerah, kepolisian, organisasi non-pemerintah, dan lembaga agama.
13. Melibatkan sektor pendidikan dan lapangan kerja untuk mendukung reintegrasi sosial.
14. Pemantauan Pasca-Rehabilitasi
15. Mengembangkan program pasca-rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan (relapse).
16. Memberikan pelatihan kerja untuk membantu mereka beradaptasi di masyarakat.
17. Peningkatan Dana dan Infrastruktur
18. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk rehabilitasi.
19. Memastikan fasilitas rehabilitasi memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal ini adapun yang mempengaruhi meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba antara lain berupa Capaian indikator kinerja kegiatan **persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup** di wilayah Provinsi Aceh dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi ke dalam kategori internal (dalam kendali program) dan eksternal (kondisi lingkungan atau masyarakat).

Faktor Internal yang mempengaruhi kegiatan ini antara lain adalah Ketersediaan Layanan Rehabilitasi yang dimana ini memerlukan perhatian terutama pada Jumlah dan distribusi pusat rehabilitasi di Aceh, terutama di daerah terpencil terutama pada Ketersediaan layanan medis dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan individu. dan Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana rehabilitasi ini tentu berpengaruh pada Kualitas Pemulihan Kedepannya

Faktor Eksternal yang sangat berperang penting juga antara lain Stigma Sosial Masyarakat Terhadap Pandangan masyarakat kepada pecandu dan juga kurangnya kesadaran bahwa pecandu adalah korban yang membutuhkan pemulihan.

Hal ini dapat dilihat dari tabel persentase peningkatan kualitas hidup pada pecandu di masing masing satker.

**Tabel 64 Data capaian indikator kinerja kegiatan Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (%)
1.	BNN Provinsi Aceh	81.32
2.	BNN Kota Banda Aceh	91.67
3.	BNN Kabupaten Pidie	75
4.	BNN Kabupaten Pidie Jaya	68
5.	BNN Kabupaten Bireuen	96,71
6.	BNN Kabupaten Lhokseumawe	94.05
7.	BNN Kota Langsa	97,14
8.	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	83,13

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (%)
9.	BNN Kabupaten Gayo Lues	68
10.	BNN Kabupaten Aceh Selatan	89,53
11	BNN Kota Sabang	70
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH</b>		<b>91,44</b>

Berikut adalah *analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja peningkatan kualitas hidup pecandu narkoba di wilayah Aceh, beserta rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan capaian tersebut:*

1. Peningkatan jumlah fasilitas rehabilitasi di beberapa wilayah Aceh.
2. Adanya program berbasis pendekatan individu, seperti konseling dan terapi kelompok.
3. Layanan berbasis *community-based treatment and rehabilitation (CBTR)* telah diterapkan di beberapa daerah.

**Tantangan yang harus dihadapi kedepannya berupa** Keterbatasan jumlah tenaga ahli dan fasilitas di daerah terpencil. Penguatan Infrastruktur dan Layanan Rehabilitasi dan fokus pada mendirikan pusat rehabilitasi dengan dukungan dari pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas fasilitas rehabilitasi yang sudah ada. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, edukasi, pemantauan pasca-rehabilitasi, dan kerjasama lintas sektor, BNNP Aceh dapat memaksimalkan capaian kinerja pada peningkatan kualitas hidup pecandu narkoba. Implementasi rencana aksi ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

## SASARAN KEGIATAN XI

“Meningkatnya Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. ***Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.***

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut .

Definisi operasional dari jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan. Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

- a. Jumlah total target jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- b. Jumlah realisasi dari target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2022, dimana Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2022 tidak ada target, dan realisasi juga tidak ada, dengan perhitungan sebagai berikut :



**Tabel 65 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Jaringan)
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	1
2.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2022</b>		<b>100%</b>

**Tabel 66 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	$= \sum (b / a) \times 100$	$= \sum 1 / 1 \times 100$ $= 100\%$	$\Sigma$ = Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan <b>a</b> = Jumlah total target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan <b>b</b> = Jumlah realisasi dari target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan

**Tabel 67 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	$= \sum (b / a) \times 100$	$= \sum 1 / 1 \times 100$ $= 100\%$	$\Sigma$ = Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan <b>a</b> = Jumlah total target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan <b>b</b> = Jumlah realisasi dari target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :**

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 68 Pencapaian kinerja Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	0 Jaringan	1 Jaringan	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja ditahun 2024 tidak ada target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan sehingga tidak ada realisasi kinerja pada kegiatan tersebut.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :**

Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, untuk IKK nya yaitu “Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan, pada tahun 2024 ditetapkan Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh adalah sebanyak 1 jaringan dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 1 jaringan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2022 tidak diberikan target, maka dapat disimpulkan peta jaringan sebanyak 0 jaringan dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 0 jaringan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 0%.

**Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jrgn	2 Peta Jrgn	0 Peta Jrgn	0 Peta Jrgn	3 Peta Jrgn	4 Peta Jrgn	0 Peta Jrgn	1 Peta Jrgn

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :**

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	6 Jaringan	1 Jaringan	16,66%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 6 jaringan untuk Meningkatkan pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 1 jaringan dengan persentase capaian 16,66%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

- Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.
- Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkotika dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan.

**Tabel 71 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = (4 - 5)
1.	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	100% Target : 1 Jaringan Realisasi : 1 Jaringan	0,01%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,01%

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :** Mendapat laporan langsung dari informan tentang adanya

seseorang yang diketahui sebagai pengguna dan dicurigai sebagai Pengedar Narkotika di Wilayah Provinsi Aceh.

- a. Bahwa dengan adanya keterangan dari pelapor tersebut, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap target operasi.
- b. Dilakukan pembukaan CDR/SMS serta penyadapan terhadap nomor-nomor handphone yang digunakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan target.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

- a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penindakan.
- b. Mengintensifkan tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil serta dibutuhkannya penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.
- c. Perlunya peningkatan sinergitas antara aparat pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Aceh serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkotika.

## SASARAN KEGIATAN XII DAN XIII

“Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang lainnya”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

### **1. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21.**

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Definisi operasional dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

- a. Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21
- b. Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 19 berkas perkara Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu dengan 40 berkas perkara 210% (*data P21 terlampir*), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 72 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	BNNP/ BNNK	Capaian
1.	Jumlah berkas penyidikan tindak pidana narkotika	Bnnp Aceh	30
		Bnnk Pidie	
		Bnnk Pidie Jaya	-
		Bnnk Bireuen	-
		Bnnk Lhokseumawe	
		Bnnk Langsa	
		Bnnk Aceh Tamiang	
		Bnnk Gayo Lues	-
		Bnnk Aceh Selatan	-
		Bnnk Sabang	-
		Bnnk Banda Aceh	
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>
2.	Jumlah berkas penyidikan tindak pidana narkotika yang belum P-21	Bnnp Aceh	-
		Bnnk Pidie	-
		Bnnk Pidie Jaya	-
		Bnnk Bireuen	-
		Bnnk Lhokseumawe	-
		Bnnk Langsa	-
		Bnnk Aceh Tamiang	-
		Bnnk Gayo Lues	-
		Bnnk Aceh Selatan	-
		Bnnk Sabang	-
		Bnnk Banda Aceh	-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
3.	Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	Bnnp Aceh	-
		Bnnk Pidie	-
		Bnnk Pidie Jaya	-
		Bnnk Bireuen	-
		Bnnk Lhokseumawe	-
		Bnnk Langsa	-
		Bnnk Aceh Tamiang	-
		Bnnk Gayo Lues	-
		Bnnk Aceh Selatan	-
		Bnnk Sabang	-
		Bnnk Banda Aceh	-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
4.	Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21	Bnnp Aceh	-
		Bnnk Pidie	-
		Bnnk Pidie Jaya	-
		Bnnk Bireuen	-
		Bnnk Lhokseumawe	-
		Bnnk Langsa	-
		Bnnk Aceh Tamiang	-
		Bnnk Gayo Lues	-
		Bnnk Aceh Selatan	-
		Bnnk Sabang	-
		Bnnk Banda Aceh	-
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2022</b>		<b>210%</b>	

**Tabel 73 Pencapaian kinerja kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	$= \sum(b / a) \times 100$	$= \sum 40 / 19 \times 100$ $= 210\%$	$\Sigma$ = Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 <b>a</b> = Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 <b>b</b> = Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 74 Pencapaian kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	13 Berkas Perkara	30 Berkas Perkara	150 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang ditetapkan di perjanjian kinerja awal tahun 2024 Tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 19 berkas perkara dapat terealisasi sebanyak 40 berkas perkara yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 210%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 Tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 19 berkas perkara dapat terealisasi sebanyak 40 berkas perkara yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 210%. pada tahun 2022 Tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 17 berkas perkara dapat terealisasi sebanyak 42 berkas perkara yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 247%. Sedangkan pada tahun 2021 yang ditetapkan di perjanjian kinerja awal tahun 2021 Tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 20 berkas perkara P-21. Tindak pidana narkotika yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 44 berkas yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 220% dan tahun 2020 Tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 20 berkas perkara P-21. Tindak pidana narkotika yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 30 berkas yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 150%

**Tabel 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Brks Prkra	20 Brks Prkra	17 Brks Prkra	13 Brks Prkra	30 Brks Prkra	44 Brks Prkra	42 Brks Prkra	30 Brks Prkra

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :**  
Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas Perkara	30 Berkas Perkara	182%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 22 berkas perkara untuk Meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 40 berkas perkara dengan persentase capaian 182%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

- c. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.
- d. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkotika dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan.

**Tabel 77 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	210%  <b>Target</b> : 13 Berkas Perkara <b>Realisasi</b> : 30 Berkas Perkara	113%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 113%.

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

- a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat peredaran gelap narkotika di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh petugas dilapangan.
- b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan (Bea Cukai, Polres, BNNP/BNNK dan BNN Pusat), serta dalam proses penyidikan yaitu kejaksaan, pegadaian, dan pengadilan dalam proses pemberkasaan sampai P-21.
- c. Tersedianya SDM penyidik di BNNP/BNNK dalam penyelesaian penyidikan hingga ke tahap P-21.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

- a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.
- b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim dan dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.
- c. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparat pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Aceh serta lebih memaksimalkan pendekatan

kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkoba.

**2. Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan**

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Definisi operasional dari Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya adalah jumlah Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang terealisasi. Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

1. Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
2. Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

**Tabel 78 Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang lainnya pada satkerwil BNNP Aceh 2024**

No	Titik lahan tanaman terlarang			Ket
	Daerah	Luas Lahan	Berat	
1	Ds.Meureu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar	2,5 Ha	5 Ton	
2	Ds. Lampanah Leungah, Kec.Seulimum, Kab. Aceh Besar	1 Ha	2 Ton	

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 3 titik lokasi lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan sesuai yaitu dengan 2 titik lokasi (95%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 79 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Titik Lokasi)
1.	Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	3
2.	Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2024</b>		<b>95%</b>

**Tabel 80 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	$= \sum (b / a) \times 100$	$= \sum 4 / 3 \times 100$ $= 133\%$	$\Sigma$ = Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya <b>a</b> = Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya <b>b</b> = Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 81 Pencapaian kinerja Jumlah target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	3 Titik Lahan	2 Titik Lahan	95%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 yang ditetapkan 3 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya sehingga persentase capaian dapat terrealisasikan sebesar 95%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :**

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 yang ditetapkan 3 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya sehingga persentase realisasi sebesar 95%. Pada

tahun 2022 yang ditetapkan 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya sehingga persentase realisasi sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 juga ditetapkan 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya



sehingga persentase realisasi sebesar 100% dan tahun 2020 juga ditetapkan 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya sehingga persentase realisasi sebesar 100%

**Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi	3 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi

**Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang Lainnya	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik Lokasi	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 2 titik lokasi untuk Meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 2 titik lokasi dengan persentase capaian 100%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya** yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan penyelidikan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.
- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga

penanganan kasus narkoba kurang maksimal.

**Tabel 84 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = (4 - 5)
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	133% <b>Target</b> : 3 Titik Lokasi <b>Realisasi</b> : 2 Titik Lokasi	33,01%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 33,01%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan** dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat titik lahan tanaman ganja atau tanaman terlarang di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindak lanjuti oleh petugas dilapangan.
- b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan sampai penemuan lokasi titik tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja** dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat setempat agar dapat memberikan informasi jika ada pihak-pihak yang mendanai kegiatan penanaman lahan ganja.
- b. Menambah peralatan operasional dan alat teknologi bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.
- c. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dan peningkatan SDM personil Tim.
- d. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

## SASARAN KEGIATAN XII DAN XIII

“Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang lainnya”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

### 1. **Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan.**

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Definisi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah menyelenggarakan pembinaan perawatan dan pemeliharaan fisik maupun administrasi termasuk pembinaan fasilitas keamanan dan ketertiban tahanan. Adapun metode pengukuran indikator tersebut yaitu:

1. Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan.
2. Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 100 indeks dari jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan sesuai target yaitu dengan 100 indeks (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 86 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (bulan)
1.	Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	12
2.	Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	12
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021</b>		<b>100</b>

**Tabel 87 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$= \sum (b / a) \times 100$	$= \sum 12 / 12 \times 100$ $= 100\%$	$\sum$ = Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan a = Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan b = Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 88 Pencapaian kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi 100 atau persentase capaian sebesar 100%.



**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi 100 atau sebesar 100%. Pada tahun 2022 yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi 100 atau sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2021 realisasi kinerja dan capaian kinerja juga sama yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi 100 atau sebesar 100% pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan. Begitu juga pada tahun 2020 realisasi kinerja dan capaian kinerja juga sama yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan

kesehatan tahanan dapat terealisasi 100 atau sebesar 100% pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

**Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks							

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 90 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 100 Indeks untuk Meningkatkan pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika, dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 100 Indeks dengan persentase capaian 100%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya** yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan penyelidikan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.
- Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal.

**Tabel 91 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%  Target : 100 Indeks Realisasi : 100 Indeks	11,07%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,07%. Efisiensi tersebut di peroleh melalui Instruksi Surat Edaran Nomor : SE/185/XII/SU/PR.02.01/2022/BNN tentang Automatic Adjustmen Belanja Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan** dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terselenggaranya koordinasi, administrasi dan pengendalian yang baik terhadap kegiatan pembinaan serta perawatan tahanan dan pemeliharaan fisik tahanan termasuk pembinaan fasilitas tahanan.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana** aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan tahanan.
- b. Diperlukan ruang pemeriksaan kesehatan tahanan yang dekat dengan sel tahanan.
- c. Diperlukan penambahan sel tahanan wanita.
- d. Diperlukan penambahan petugas jaga tahanan (sipir) dan Polwan serta perawat laki- laki.
- e. Diperlukan brankar (tempat tidur dorong) untuk tahanan yang perlu perawatan khusus dalam sel.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana sel tahanan seperti ruangan sel isolasi, kipas angin, sarana pendukung.
- g. Perlu adanya MOU dengan rumah sakit rujukan.
- h. Tersinkronisasinya laporan tahanan masuk dan keluar oleh tim kesehatan Seksi Wastahti

**2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika.**

Definisi Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut yaitu:

1. Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika

2. Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 100 indeks dari Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika di wilayah provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi sesuai target yaitu dengan 100 indeks (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 92 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika di wilayah provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (bulan)
1.	Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	12
2.	Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	12
<b>INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021</b>		<b>100</b>

**Tabel 91 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	$= \sum (b / a) \times 100$	$= \sum 12 / 12 \times 100$ $= 100\%$	$\Sigma$ = Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika a = Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika b = Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 92 Pencapaian kinerja Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika di wilayah provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Aceh dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika dapat terealisasi 100 atau persentase capaian sebesar 100%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika dapat terealisasi 100 atau sebesar 100%. Pada tahun 2022 yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika dapat terealisasi 100 atau sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 juga sama realisasi kinerja dan capaian kinerja ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika dapat terealisasi 100 atau sebesar 100% pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan. pada tahun 2020 juga sama realisasi kinerja dan capaian kinerja ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika dapat terealisasi 100 atau sebesar 100% pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

**Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika	100 Indeks							

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 100 Indeks untuk Meningkatkan pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba, dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 100 Indeks dengan persentase capaian 100%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya** yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkoba

kurang maksimal, sehingga pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak terlaksana dengan semestinya.

**Tabel 95 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh  
Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100%  Target : 100 Indeks Realisasi : 100 Indeks	11,07%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,07%.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan** dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terlaksana dengan baik seluruh proses baik itu dalam menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku control barang bukti.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja** dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti.
- b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dan peningkatan SDM personil.
- c. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

## SASARAN KEGIATAN XVI DAN XVII

“Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

### 1. Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Penyerapan, konsistensi , capaian realisasi output (CRO) dan efisiensi.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 88 indeks dari nilai kinerja anggaran BNNP Aceh pada tahun 2024, ternyata belum dapat terealisasi sesuai target yaitu dengan 86,93 indeks (98,78%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 96 Segmen perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN provinsi Aceh**

No.	Segmen Pengukuran Indikator Kinerja Yang Dinilai (%)	Bobot	Capaian (%)
1.	Perencanaan Anggaran	100	100
2.	Pelaksanaan Anggaran	99,95	95
<b>TOTAL AKUMULATIF NILAI KINERJA ANGGARAN BNN BNN PROVINSI ACEH TAHUN 2024</b>			<b>99,98</b>

**Tabel 97 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan target Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	$= \frac{\sum (n2 / n1)}{100} \times 100$	$= \frac{\sum (85,81 / 87)}{100} \times 100$ = 98,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\sum</math> capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian</li> <li>- <b>n1</b> = Realisasi Anggaran</li> <li>- <b>n2</b> = Target Nilai Kinerja Anggaran BNN</li> </ul>

Capaian nilai kinerja anggaran BNNP Aceh berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU dengan target capaian 86 terealisasi 99,98 dengan capaian target mencapai 98,63%. Data ini di peroleh dari segmen pengukuran nilai kinerja pada gambar ini : Gambar Pencapaian Kinerja Anggaran BNNP Aceh pada Aplikasi Sismonev Kemenkue (SMART) Tahun 2024

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 98 Pencapaian kinerja target Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	86 Indeks	99,98 Indeks	110,63%

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 87 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN, dapat terealisasi 99,98 atau dengan capaian persentase sebesar 110.63%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 87 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 99,98 atau dengan capaian sebesar 110.63% Pada tahun

2022 diberikan target dengan indeks 88 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 86,93 atau dengan capaian sebesar 98,78%, sedangkan pada tahun 2021 Dari target dan realisasi kinerja tahun 2021 diberikan target dengan indeks 95 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran



BNN dapat terealisasi 87,01 atau dengan capaian sebesar 91,58%, tahun 2020 diberikan target dengan indeks 88 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 83,90 atau dengan capaian sebesar 94%.

**Tabel 99 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88 Indeks	95 Indeks	88 Indeks	86 Indeks	83,19 Indeks	87,01 Indeks	86,93 Indeks	99,98 Indeks

**Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNP Aceh Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Aceh Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	96 Indeks	99,98 Indeks	105%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 96 Indeks untuk Meningkatkan proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 99,98 Indeks dengan persentase capaian 105%.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

**Tabel 101 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satkerwil BNNP Aceh Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	6 = ( 4 - 5 )
1.	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	98,63%  Target : 86 Indeks Realisasi : 99,98 Indeks	15%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15%.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Aceh.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

2. **Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan nilai NKA mencapai target.**

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 10 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi Aceh dengan Nilai Kinerja Anggaran Tercapai pada tahun 2024, ternyata belum dapat terealisasi sesuai target yaitu 6 BNN Kab/Kota yang tercapai targetnya (60%).

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 103 Pencapaian kinerja jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	7 BNN Kab/Kota	7 BNN Kab/Kota	100%

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan 10 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 6 BNNK atau dengan capaian sebesar 60%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 diberikan target dengan 10 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 6 BNNK atau dengan capaian sebesar 60%. Pada tahun 2022 diberikan target dengan 10 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 2 BNNK atau dengan capaian sebesar 20%. Sedangkan pada tahun 2021 diberikan target dengan 10 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN tidak dapat terealisasi satupun BNNK atau dengan capaian sebesar 0%.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban agar pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu

2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Aceh.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

Target yang Nilai Kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 untuk Wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 116. Dari target yang sudah di tetapkan, ada 9 BNN Kabupaten/Kota yang memenuhi target dan 1 BNN Kabupaten/Kota belum memenuhi target, artinya secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik. Data ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 104 Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh 2024**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Satker T.A 2022 Wilayah BNNP Aceh				
No	BNN Kabupaten/Kota Satker Wilayah BNNP Aceh	Target Nilai Kinerja Anggaran (Indek)	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (Indek)	Keterangan
1	BNNK SABANG	86	98,96	Tercapai
2	BNNK BANDA ACEH	87	99,85	Tercapai
3	BNNK PIDIE	87	96,48	Tercapai
4	BNNK PIDIE JAYA	87	50,00	Tidak Tercapai
5	BNNK BIREUEN	87	99,56	tercapai
6	BNNK LHOKSEUMAWE	88	99,98	tercapai
7	BNNK LANGSA	86	99,98	Tercapai
8	BNNK ACEH TAMIANG	86	99,53	Tercapai
9	BNNK GAYO LUES	88	88	Tercapai
10	BNNK ACEH SELATAN	88	99,93	Tercapai

Dari data hasil rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh, ada 9 BNN Kab/Kota yang memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dan 1 BNNK yang tidak Memenuhi Target Yaitu BNNK Pidie Jaya.

### SASARAN KEGIATAN XVII DAN XIX

“Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh  
Definisi atau pengertian administrasi keuangan dapat diartikan secara luas dan sempit. Administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk

menghasilkan aktivitas organisasi. Termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Dan Administrasi keuangan dalam arti yang sempit adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi.

**Tabel 105 Pencapaian target kinerja Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	97,25 Indeks	99,95 Indeks	106,5 %

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dana masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2022. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu :

1. **Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :
  - a. Revisi DIPA
  - b. Deviasi Halaman III DIPA
  - c. Pagu Minus
2. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
  - a. Data Kontrak
  - b. Pengelolaan UP dan TUP
  - c. LPJ Bendahara
  - d. Dispensasi SPM

3. **Efektivitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
  - a. Penyerapan Anggaran
  - b. Penyelesaian Tagihan
  - c. Cap
  - d. Retur SP2D
4. **Efisiensi pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :
  - a. Kesalahan SPM
  - b. Perencanaan Kas

**Kategori Nilai IKPA :**

1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
4. KURANG : nilai IKPA < 70

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tahun 2024, dimana 92 indeks untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi melebihi target yaitu dengan 98 indeks (106,5%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 106 Segmen perhitungan indikator kinerja kegiatan  
Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh**

No	Segmen yang dinilai	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	10	100	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	100	10,00
3	Penyerapan Anggaran	20	100	20,00
4	Belanja Kontraktual	10	100	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10	100	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	99,59	9,96
7	Dispensasi SPM	5	100	5,00
8	Capaian Output	25	100	25,00
<b>Total Nilai IKPA</b>		<b>100</b>	<b>789,45</b>	<b>99,59</b>

**Tabel 107 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan  
Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	$= \frac{\sum (n2 / n1) \times 100}{100}$	$= \frac{\sum (92 / 98) \times 100}{100}$  $= 106,5\%$	- $\sum$ capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian - n1 = Realisasi - n2 = Target Nilai IKPA

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98 atau dengan persentase capaian sebesar 106,5%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98 atau dengan persentase capaian sebesar 106,5 Pada tahun 2022 diberikan target dengan indeks 95 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98,94 atau dengan persentase capaian sebesar 104,14%. Sedangkan pada tahun 2021 indeks 94 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 97,65 atau dengan persentase capaian sebesar 103,88%%

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Aceh.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
  2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
  3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.
2. ***Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target***

***Tabel 108 Pencapaian target kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target***

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	10 BNN Kab/ Kota	7 BNN Kab/Kota	85 %

Target Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 untuk Wilayah Provinsi Aceh sebesar 10 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, Dari target yang sudah di ditetapkan, sebanyak 10 (sepuluh) BNN Kabupaten/Kota sudah mencapai target. Data ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 109 Realisasi BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target**

<b>Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) T.A 2024 Satker Wilayah BNNP Aceh</b>				
<b>No</b>	<b>Satker Wilayah BNNP Aceh</b>	<b>Target Nilai IKPA (Indek)</b>	<b>Realisasi Nilai IKPA (Indek)</b>	<b>Keterangan</b>
1	BNNK SABANG	92	98.42	Tercapai
2	BNNK BANDA ACEH	99.26	99.16	Tidak Tercapai
3	BNNK PIDIE	98,49	96,76	Tidak Tercapai
4	BNNK PIDIE JAYA	99,46	97,79	Tidak Tercapai
5	BNNK BIREUEN	96	99,88	Tercapai
6	BNNK LHOKSEUMAWE	95.12	99.96	Tercapai
7	BNNK LANGSA	99,98	100	Tercapai
8	BNNK ACEH TAMIANG	99,98	100	Tercapai
9	BNNK GAYO LUES	92	99	Tercapai
10	BNNK ACEH SELATAN	96.33	99.96	Tercapai

Dari data hasil rekapitulasi nilai IKPA seluruh satker wilayah BNN Provinsi Aceh mencapai target. Nilai IKPA rata-rata dari seluruh satker wilayah BNNP aceh adalah 98,1. Diharapkan untuk tahun 2024 akan ditingkatkan lagi kinerja sehingga hasil yang dicapai terealisasi lebih maksimal.

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan 10 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, dari 10 BNNK hanya 7 yang mencapai target sisanya tidak yang tidak Mencapai target yaitu BNNK Banda Aceh, BNNK Pidie Jaya, BNNK Pidie..

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 diberikan target dengan 10 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, kesemuanya mencapai target dan sesuai harapan. Pada tahun 2022 diberikan target dengan 10 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target.

kesemuanya mencapai target dan sesuai harapan. Sedangkan pada tahun 2021 10 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, kesemuanya mencapai target dan sesuai harapan.

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Aceh.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

## SASARAN KEGIATAN XX

“Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi unit Kerja Vertikal”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

### 1. Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal

Definisi Zona Integritas adalah Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disertai dengan Surat Keputusan Bersama

dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya.

Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 110 Pencapaian target kinerja Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	75 Indeks	100 %

Dari target dan realisasi kinerja untuk nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal tahun 2024 diberikan target dengan 75 Indeks ditetapkan, dapat terealisasi 73,14 Indeks atau dengan capaian sebesar 97,52%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 diberikan target dengan nilai 75 Indeks yang ditetapkan, dapat terealisasi 73,14 Indeks serta dengan persentase sebesar 97,52. Untuk tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena belum ada perbandingannya

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel dalam berkas ZI,

2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.

## 2. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 41.122.479.000,-** (*Empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) program yaitu : *Program Dukungan Manajemen BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Anggaran ini akumulasi dari seluruh Satker Wilayah BNNP Aceh, dapat di uraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 111 Akumulasi total anggaran program Dukmen dan P4GN satker wilayah BNNP Aceh 2024**

No	SATKER WILAYAH BNNP ACEH	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN	% SISA
1	BNNP ACEH	21,222,295,000	20,704,305,683	97.56	517,989,317	2.44
2	BNNK SABANG	1,628,186,000	1,623,745,207	99.73	4,440,793	0.27
3	BNNK BANDA ACEH	1,579,266,000	1,535,630,103	97.24	43,635,897	2.76
4	BNNK PIDIE	1,699,703,000	1,465,121,954	86.20	234,581,046	13.80
5	BNNK PIDIE JAYA	2,175,848,000	2,134,504,006	98.10	41,343,994	1.90
6	BNNK BIREUEN	2,209,446,000	2,163,772,357	97.93	45,673,643	2.07
7	BNNK LHOKEUMAWE	2,172,744,000	2,156,378,024	99.25	16,365,976	0.75
8	BNNK LANGSA	1,873,115,000	1,733,263,807	92.53	139,851,193	7.47
9	BNNK ACEH TAMIANG	1,691,220,000	1,684,128,653	99.58	7,091,347	0.42
10	BNNK GAYO LUES	2,064,165,000	2,030,558,416	98.37	33,606,584	1.63
11	BNNK ACEH SELATAN	1,751,419,000	1,735,371,002	99.08	16,047,998	0.92
<b>TOTAL</b>		<b>40,067,407,000</b>	<b>38,966,779,212</b>	<b>98.8</b>	<b>1,100,627,788</b>	<b>2.22</b>

Pada tabel total realisasi anggaran diatas menjelaskan, Penggunaan anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh tahun 2024 dari total pagu sebesar Rp. 40.067.407.000,- (*Empat Puluh miliar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp. 38,966,779,212,- (*Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 98,8% (*Sembilan puluh delapan koma Delapan persen*) sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1,100,627,788,- (*Satu Miiliar Seratus Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar **2,22%** (*Dua koma dua puluh Dua persen*) dari anggaran.

**A. Program Dukungan Manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh, dengan PAGU TA. 2024 Rp. 30.676.853.000,-**

**Tabel 112 Akumulasi anggaran satker wilayah BNNP Program Dukungan Manajemen Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh 2024**

NO.	SATKER WILAYAH BNNP ACEH	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN	% SISA
1	BNNP ACEH	18,523,486,000	18,052,491,397	97.46	479,994,603	2.54
2	BNNK SABANG	1,155,971,000	1,155,179,812	99.93	791,188	0.07
3	BNNK BANDA ACEH	1,112,469,000	1,108,766,926	99.67	3,702,074	0.33
4	BNNK PIDIE	1,149,586,000	1,119,545,314	97.39	30,040,686	2.61
5	BNNK PIDIE JAYA	1,305,968,000	1,303,928,814	99.84	2,039,186	0.16
6	BNNK BIREUEN	1,373,224,000	1,332,958,357	97.07	40,265,643	2.93
7	BNNK LHOKEUMAWE	1,333,346,000	1,325,656,174	99.42	7,689,826	0.58
8	BNNK LANGSA	1,386,039,000	1,348,392,950	97.28	37,646,050	2.72
9	BNNK ACEH TAMIANG	1,247,107,000	1,245,863,703	99.90	1,243,297	0.10
10	BNNK GAYO LUES	1,247,343,000	1,241,613,916	99.54	5,729,084	0.46
11	BNNK ACEH SELATAN	1.260.460.000	1.253.101.002	99.42	7,358,998	0.58
<b>TOTAL</b>		<b>29,834,539,000</b>	<b>29,234,397,363</b>	<b>99.85</b>	<b>600,141,637</b>	<b>0.15</b>

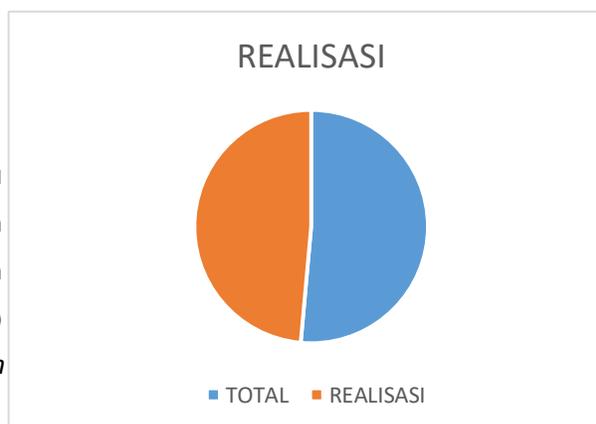
Pada tabel total realisasi anggaran diatas menjelaskan, Penggunaan anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh tahun 2024 dari total pagu sebesar **Rp. 29,834,539,000,-** (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dapat terealisasi untuk program dukungan manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh TA. 2024 sebesar **Rp. 29,234,397,363,-** (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau sekitar **99,85%** (*sembilan puluh Sembilan koma Delapan Puluh Lima Persen*), dengan sisa anggaran Rp. 600,141,637.- (*Enam Ratus Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) Atau Dengan Sisa Persen yaitu 0,15%.

**B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Satker Wilayah BNNP Aceh TA 2024 dengan PAGU sebesar Rp. 10.445.626.000,-**

**Tabel 113 Akumulasi anggaran satker wilayah BNNP Aceh Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) TA 2024**

NO.	SATKER WILAYAH BNNP ACEH	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN	% SISA
1	BNNP ACEH	2,698,809,000	2,651,814,286	98.26	46,994,714	1.74
2	BNNK SABANG	472,215,000	468,565,395	99.23	3,649,605	0.77
3	BNNK BANDA ACEH	466,797,000	426,863,177	99.16	3,933,823	0.84
4	BNNK PIDIE	550,117,000	345,576,640	62.82	204,540,360	37.18
5	BNNK PIDIE JAYA	387,069,000	386,471,000	99.85	598,000	0.15
6	BNNK BIREUEN	836,222,000	830,814,000	99.35	5,408,000	0.65
7	BNNK LHOKEUMAWE	839,398,000	830,721,850	98.97	8,676,150	1.03
8	BNNK LANGSA	487,076,000	384,870,857	79.02	102,205,143	20.98
9	BNNK ACEH TAMIANG	444,113,000	438,264,950	98.68	5,848,050	1.32
10	BNNK GAYO LUES	816,822,000	788,944,500	96.59	27,877,500	3.41
11	BNNK ACEH SELATAN	490.959.000	482.270.000	98.23	8,689,000	1.77
<b>TOTAL</b>		<b>7,998,638,000</b>	<b>7,552,906,655</b>	<b>98.85</b>	<b>445,731,345</b>	<b>2.15</b>

Pada tabel total realisasi anggaran diatas menjelaskan, Penggunaan anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh tahun 2024 dari total pagu untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebesar **Rp.7,998,638,000,-** (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh



Delapan Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), dapat terealisasi tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.7,552,906,655,-** (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Lima Puluh Dua Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) atau sekitar **98,85%** (Sembilan puluh Delapan koma Delapan Puluh Lima Persen). Sisa anggaran dari program ini adalah **Rp.445,731,345,-** (Empat Ratus Juta Empat Puluh Lima Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ripiah) atau sekitar **2,15%** (Dua koma Lima Belas persen). Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) satker wilayah BNNP Aceh TA. 2024 disebabkan beberapa faktor : Adanya perintah dari Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan pagu anggaran *Automatic Adjustment*.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah dapat merealisasikan berbagai capaian program dan kegiatan melalui implementasi P4GN sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024.

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LKIP mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian kinerja Satker Wilayah BNN khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2024 bisa tercapai.

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan tugas secara administratif dan operasional berdasarkan rencana program dan anggaran yang sudah direncanakan, guna mendapatkan dampak pencapaian kinerja secara jelas, fokus, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi tuntutan bagi pencapaian keberhasilan tugas Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh serta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melaksanakan program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja fisik yang dilaksanakan dalam tahun 2024 BNNP Aceh mencapai 134% sedangkan akuntabilitas kinerja keuangan satker wilayah mencapai 98,79%.



Pengukuran hasil capaian kinerja tersebut menggunakan komponen pengukuran kinerja yang terdiri dari sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan realisasi capaian. Pengukuran kinerja tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan suatu program dan kegiatan, dan untuk menelusuri kemajuan program kearah pencapaian tujuan, sasaran serta dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekuatan program.

Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja BNNP Aceh pada periode berikutnya.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : RUDY AHMAD SUDRAJAT, S.I.K., M.H.**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**KEPALA BNN PROVINSI ACEH**

**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

**RUDY AHMAD SUDRAJAT, S.I.K., M.H.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH**

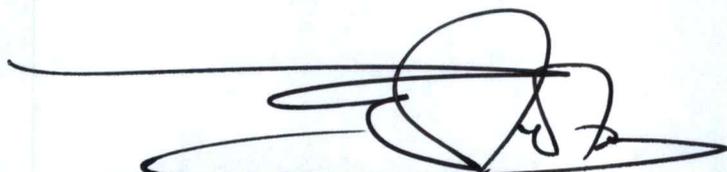
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	10 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	15 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,4 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	22 Unit
9	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
11	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	0 Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	13 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	3 Titik Lokasi
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
15	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	7 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,25 Indeks
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	10 Kabupaten/Kota
20	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.964.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.1.176.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.2.275.702.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.2.000.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.163.295.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.434.074.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.134.387.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.60.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.1.160.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.196.565.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.16.835.030.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.139.878.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.147.788.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.14.343.152.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolanan	Rp.120.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

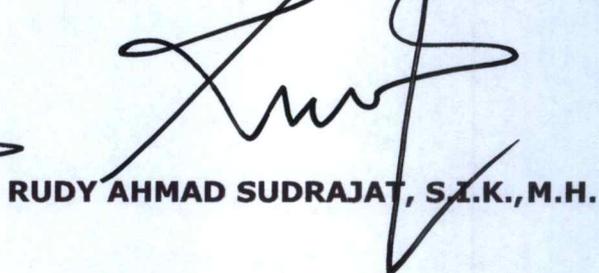


**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI ACEH**



**RUDY AHMAD SUDRAJAT, S.I.K., M.H.**



**BNN**  
**PROVINSI**  
**ACEH**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI ACEH

# RENCANA AKSI PAGN BNNP ACEH TA. 2024























Komponen/ Aktivitas	054_F	Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal (Perawatan K9)			6,500,000													
Rincian Output (RO)	3239.EBA.994	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Perkantoran)	12	Layanan	2,312,852,000													
Komponen/ Aktivitas	002_A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor)			80,510,000													
Komponen/ Aktivitas	002_B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor)			60,020,000													
Komponen/ Aktivitas	002_C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Perawatan Kendaraan Dinas)			542,800,000													
Komponen/ Aktivitas	002_D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Langganan Daya dan Jasa Lainnya)			357,060,000													
Komponen/ Aktivitas	002_E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Tenaga Kerja Kontrak)			1,052,700,000													
Komponen/ Aktivitas	002_F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Rumah Dinas Kepala BNNP Aceh)			67,240,000													
Komponen/ Aktivitas	002_G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Honor Pengelola BMN)			7,200,000													
Komponen/ Aktivitas	002_H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)			7,200,000													
Komponen/ Aktivitas	002_I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB)/ Wilayah)			10,800,000													
Komponen/ Aktivitas	002_J	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB))			13,200,000													
Komponen/ Aktivitas	002_K	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Keperluan Sehari-hari Perkantoran)			82,322,000													
Komponen/ Aktivitas	002_L	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL)			900,000													
Komponen/ Aktivitas	002_M	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Rekonsiliasi Laporan BMN ke Kanwil)			900,000													
Komponen/ Aktivitas	002_N	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Keperluan Rumah Tangga Pimpinan)			30,000,000													

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI ACEH**  
  
**Rudy Ahmad Sutrajat, S.I.K., M.H**

DATA TAHANAN BNNP TAHUN 2024

NO	NAMA TAHANAN	TEMPAT & TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	AGAMA	NIK	ALAMAT KTP	ALAMAT DOMISILI	LJKN	JUMLAH BS NARKOTIKA	JUMLAH BS NARKOTIKA NON-NARKOTIKA	NOMOR & TGL SPJIAN	STATUS KEWARGAGEDERAAN	FOTO	KETERANGAN TAHANAN
1	JAMALUDDIN BIN ALI BASYAH	BUKET ALUE PUTEH & 05 JUNI 1983	31	LAKI-LAKI	ISLAM	10814050930000	DUSUN ABU LANGKAT KEL. BUKET ALUE PUTEH KEC. TANAH JAMBO AYE KAB. ACEH UTARA	DUSUN ABU LANGKAT KEL. BUKET ALUE PUTEH KEC. TANAH JAMBO AYE KAB. ACEH UTARA	LKN0001-NAR102024BNNP ACEH	1 (SATU) PAKET BESAR NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 1.199,28 (SERATUS SERATUS SEMBELAN PULUH SEMBELAN KOMA DUA DELAPAN) GRAM	(1) SATU BUAH, TIS RANSEL WARNA COKLAT BERTULUSKAN SYNCASE 2, 1 (SATU) UNIT HP MERK OPPO A86 WARNA MERAH MUDA MUTIARA	NOMOR: SP/PRN-HAN0001/02024BNNP ACEH TANGGAL 24 JANUARI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
2	MUHAMMAD NASIR BIN MUHAMMAD YUSUF	GEULUMPANG PAYONG/ 26 FEBRUARI 2003	21	LAKI-LAKI	ISLAM	110801010740060	DUSUN HIMPUNAN KEL. GLUMPANG PAYONG KEC. BAKTYA KAB. ACEH UTARA	DUSUN HIMPUNAN KEL. GLUMPANG PAYONG KEC. BAKTYA KAB. ACEH UTARA	LKN0001-NAR102024BNNP ACEH	1 (SATU) PAKET BESAR NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 1.199,28 (SERATUS SERATUS SEMBELAN PULUH SEMBELAN KOMA DUA DELAPAN) GRAM	(1) SATU BUAH, TAS RANSEL WARNA COKLAT BERTULUSKAN SYNCASE 2, 1 (SATU) UNIT HP MERK OPPO A86 WARNA MERAH MUDA MUTIARA	NOMOR: SP/PRN-HAN0002/02024BNNP ACEH TANGGAL 24 JANUARI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
3	NILA RAWATI BINTI LYAS	LHOKSEUMAWE/ 25 MARET 1987	37	PEREMPUAN	ISLAM	117302650387004	JL LISTRIK GO BARONA DUSUN MESJID LHOKSEUMAWE	JL LISTRIK GO BARONA DUSUN MESJID LHOKSEUMAWE	LKN0002-NAR102024BNNP ACEH	1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 1.046,32 (SERATUS EMPAT PULUH SEMBELAN KOMA TIGA DUA) GRAM	(1) SATU UNIT HP ANDROID MERK REDMI WARNA HITAM	NOMOR: SP/PRN-HAN0003/02024BNNP ACEH TANGGAL 04 FEBRUARI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
4	AFDANIL BIN JAFARUDDIN	BLANG CUT/ 08 SEPTEMBER 2000	24	LAKI-LAKI	ISLAM	110807008000003	DUSUN PAYA MERDI KEL. BLANG CUT KEC. MELURAH MULIA KAB. ACEH UTARA	DUSUN PAYA MERDI KEL. BLANG CUT KEC. MELURAH MULIA KAB. ACEH UTARA	LKN0003-NAR102024BNNP ACEH	1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 1.046,32 (SERATUS EMPAT PULUH SEMBELAN KOMA TIGA DUA) GRAM	1 (SATU) BUAH TIMBANGAN WARNA MERAH MERK GREEN HORSE	NOMOR: SP/PRN-HAN0004/02024BNNP ACEH TANGGAL 26 FEBRUARI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
5	RAJA PRADKA FHOANA BIN YUSRIFAT	LHOKSEUMAWE/ 03 AGUSTUS 2000	24	LAKI-LAKI	ISLAM	117301030800001	SERBATANG RUSEP KEL. MEUNASAH BLANG KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE	SERBATANG RUSEP KEL. MEUNASAH BLANG KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE	LKN0004-NAR102024BNNP ACEH	8 (ENAM) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 108,200 ( SERATUS DELAPAN RIBU DUA RATUS KOMA SATU ) GRAM DAN 125 (SERATUS DUA PULUH LIMA) DALAM BENTUK TANAMAN DENGAN BEBAT 125,970 (5 SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBELAN RATUS PULUH ENAM KOMA TUJUH PULUH LIMA) GRAM	1 (SATU) UNIT HP MERK REDMI 8A WARNA BIRU	NOMOR: SP/PRN-HAN0005/02024BNNP ACEH TANGGAL 28 MARET 2024	INDONESIA		TAHAP 2
6	MUHAMMAD B BIN ALI BASYAH	MUREU BUNG UUD JULI 1985	39	LAKI-LAKI	ISLAM	108030301860001	KEL. MUREU BUEUNG U KEC. INDRAPURI KAB. ACEH BESAR	KEL. MUREU BUEUNG U KEC. INDRAPURI KAB. ACEH BESAR	LKN0005-NAR102024BNNP ACEH	8 (DELAPAN) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA SEBERAT NETTO 108,200 ( SERATUS DELAPAN RIBU DUA RATUS KOMA SATU ) GRAM DAN 125 (SERATUS DUA PULUH LIMA) DALAM BENTUK TANAMAN DENGAN BEBAT 125,970 (5 SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBELAN RATUS TUJUH PULUH KOMA NOL LIMA) GRAM	1 (SATU) BUAH TIMBANGAN MERK GREEN HORSE WARNA MERAH MUDA, 2 (DUA) BUAH CETAKAN YANG TERBUAT DARI BEBI, 4 (EMPAT) BUAH DONGKRAK BOTOL WARNA MERAH DAN BIRU DONGKER DAN 1 (SATU) UNIT HP MERK NOKIA WARNA HITAM	NOMOR: SP/PRN-HAN0006/02024BNNP ACEH TANGGAL 18 APRIL 2024	INDONESIA		TAHAP 2
7	MUNAZIR BIN ABDULLAH	MUREU BUNG U/10 OKTOBER 1990	34	LAKI-LAKI	ISLAM	108051010900004	LAMCEU BARO KEL. SIBREH KEC. SUKAMAMUK KAB. ACEH BESAR	LAMCEU BARO KEL. SIBREH KEC. SUKAMAMUK KAB. ACEH BESAR	LKN0005-NAR102024BNNP ACEH	8 (DELAPAN) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA SEBERAT NETTO 108,200 ( SERATUS DELAPAN RIBU DUA RATUS KOMA SATU ) GRAM DAN 125 (SERATUS DUA PULUH LIMA) DALAM BENTUK TANAMAN DENGAN BEBAT 125,970 (5 SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBELAN RATUS TUJUH PULUH KOMA NOL LIMA) GRAM	1 (SATU) BUAH TIMBANGAN MERK GREEN HORSE WARNA MERAH MUDA, 2 (DUA) BUAH CETAKAN YANG TERBUAT DARI BEBI, 4 (EMPAT) BUAH DONGKRAK BOTOL WARNA MERAH DAN BIRU DONGKER DAN 1 (SATU) UNIT HP MERK NOKIA WARNA HITAM	NOMOR: SP/PRN-HAN0007/02024BNNP ACEH TANGGAL 24 APRIL 2024	INDONESIA		TAHAP 2
8	MAHADIR BIN IDRIS	MUREU BARO/10 NOVEMBER 1998	26	LAKI-LAKI	ISLAM	108030101198002	DUSUN LAMPOH LHA KEL. MURJE BARO KEC. INDRAPURI KAB. ACEH BESAR	DUSUN LAMPOH LHA KEL. MURJE BARO KEC. INDRAPURI KAB. ACEH BESAR	LKN0005-NAR102024BNNP ACEH	8 (DELAPAN) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA SEBERAT NETTO 108,200 ( SERATUS DELAPAN RIBU DUA RATUS KOMA SATU ) GRAM DAN 125 (SERATUS DUA PULUH LIMA) DALAM BENTUK TANAMAN DENGAN BEBAT 125,970 (5 SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBELAN RATUS TUJUH PULUH KOMA NOL LIMA) GRAM	1 (SATU) BUAH TIMBANGAN MERK GREEN HORSE WARNA MERAH MUDA, 2 (DUA) BUAH CETAKAN YANG TERBUAT DARI BEBI, 4 (EMPAT) BUAH DONGKRAK BOTOL WARNA MERAH DAN BIRU DONGKER DAN 1 (SATU) UNIT HP MERK NOKIA WARNA HITAM	NOMOR: SP/PRN-HAN0008/02024BNNP ACEH TANGGAL 24 APRIL 2024	INDONESIA		TAHAP 2
9	ZIAUDDIN BIN TARMIZI	EMPEE TANONG/14 JUNI 1992	32	LAKI-LAKI	ISLAM	108051406290002	KEL. TUMBO BARO KEC. KUTA MALAKA KAB. ACEH BESAR	KEL. TUMBO BARO KEC. KUTA MALAKA KAB. ACEH BESAR	LKN0006-NAR102024BNNP ACEH	2 (DUA) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 48,24 (EMPAT PULUH DELAPAN KOMA DUA EMPAT) GRAM	1 (SATU) UNIT HP MERK ITEL P40 WARNA HITAM	NOMOR: SP/PRN-HAN0009/02024BNNP ACEH TANGGAL 26 APRIL 2024	INDONESIA		TAHAP 2
10	LUKMAN TA BIN TAJUT ABET	PIDE/20 NOVEMBER 1984	60	LAKI-LAKI	ISLAM	117301291164001	KEL. TUMBO BARO KEC. KUTA MALAKA KAB. ACEH BESAR	KEL. TUMBO BARO KEC. KUTA MALAKA KAB. ACEH BESAR	LKN0006-NAR102024BNNP ACEH	2 (DUA) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 48,24 (EMPAT PULUH DELAPAN KOMA DUA EMPAT) GRAM	1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG A 12 WARNA HITAM DAN 1 (SATU) UNIT MERK NOKIA 105 TA 1034 BIRU	NOMOR: SP/PRN-HAN0010/02024BNNP ACEH TANGGAL 26 APRIL 2024	INDONESIA		TAHAP 2
11	KHARUN NUR BIN JAMALUDDIN	LHOKSEUMAWE/12 APRIL 2002	22	LAKI-LAKI	ISLAM	117304120020003	DUSUN MNIS TUHA KEL. COT GIREK KANDANG KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE	DUSUN MNIS TUHA KEL. COT GIREK KANDANG KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE	LKN0007-NAR102024BNNP ACEH	1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 4,48 (EMPAT KOMA EMPAT SEMBELAN) GRAM	1 (SATU) UNIT HP MERK VIVO Y33 WARNA HITAM, DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN ROKA DUA BERSI HONDA SCOOTY WARNA HITAM TANPA NOMOR POLISI DENGAN NOMOR ROKA MHI JFG11K015991 NOMOR MESIN JFG1E1019982	NOMOR: SP/PRN-HAN0011/02024BNNP ACEH TANGGAL 29 APRIL 2024	INDONESIA		TAHAP 2
12	IRWANDA BIN GANI JALIL	BAYU/03 APRIL 1997	27	LAKI-LAKI	ISLAM	11730320370002	DUSUN KUTA AWE KEL. BLANG CUT KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE	DUSUN KUTA AWE KEL. BLANG CUT KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE	LKN0009-NAR102024BNNP ACEH	4 (EMPAT) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 10,04 (SEPULUH KOMA NOL EMPAT) GRAM, 3 (TIGA) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 73,15 (TUJUH PULUH TIGA KOMA SATU LIMA) GRAM	1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO Y71 WARNA GOLD, 1 (SATU) UNIT TIMBANGAN DIGITAL MERK F1976 WARNA HITAM, 1 (SATU) UNIT TIMBANGAN WARNA HITAM MERK DIGITAL SCALE 61 GRAM PULUH SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP BENING UKURAN 0x1, 31 (TIGA PULUH SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP BENING UKURAN 4x2	NOMOR: SP/PRN-HAN0015/02024BNNP ACEH TANGGAL 14 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
13	IBNU HAJAR BIN BASYARUDDIN	DESA HAGU /17 AGUSTUS 1990	34	LAKI-LAKI	ISLAM	110605120890000	KEL. HAGU KEC. MATANGKULI KAB. ACEH UTARA	KEL. HAGU KEC. MATANGKULI KAB. ACEH UTARA	LKN0009-NAR102024BNNP ACEH		1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK OPPO A 17 WARNA BIRU DONGKER	NOMOR: SP/PRN-HAN0016/02024BNNP ACEH TANGGAL 14 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
14	RAHMAT AQBAR BIN KASIM	DESA JELIKAT/12 NOVEMBER 2002	22	LAKI-LAKI	ISLAM	110611121100001	DUSUN RAMBONG KEL. LANGA KEC. SYAMTALIRA BAYU KAB. ACEH UTARA	DUSUN RAMBONG KEL. LANGA KEC. SYAMTALIRA BAYU KAB. ACEH UTARA	LKN0010-NAR102024BNNP ACEH	4 (EMPAT) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 48,24 (EMPAT PULUH DELAPAN KOMA DUA EMPAT) GRAM	1 (SATU) UNIT HP MERK OPPO F5 WARNA GOLD	NOMOR: SP/PRN-HAN0017/02024BNNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
15	BOYHAQI RAMADANI BIN ZULKARNUNI	BAYU/02 DESEMBER 2001	23	LAKI-LAKI	ISLAM	117303021201003	DUSUN HARAPAN INDAH KEL. LLE BLANG MANE KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE	DUSUN HARAPAN INDAH KEL. LLE BLANG MANE KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE	LKN0010-NAR102024BNNP ACEH		1 (SATU) UNIT HANDPHONE IPHONE 11 WARNA PUTIH DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK HONDA BIRU WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI BL 1876 AO NOKIA MH1K1412K03025 DAN NGSIN 1.0253709578	NOMOR: SP/PRN-HAN0018/02024BNNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
16	RIZKI RAMADANI BIN AYUDDIN	GEUDONG/06 OKTOBER 1998	26	LAKI-LAKI	ISLAM	110808208980003	KEL. LUONG KEC. SAMUDERA KAB. ACEH UTARA	KEL. LUONG KEC. SAMUDERA KAB. ACEH UTARA	LKN0010-NAR102024BNNP ACEH		1 (SATU) HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY Z FOLD WARNA HITAM DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK HONDA VARIO WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI BL 0882 KAK NOKIA MH1K1412K03025 DAN NGSIN 1K41E193327 ATAS NAMA PEMELIK AYUDDIN	NOMOR: SP/PRN-HAN0019/02024BNNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
17	MURDIN BIN M TAYIB	MANCANG/20 JUNI 1994	30	LAKI-LAKI	ISLAM	110802004900001	DUSUN TOK SAED SYARIF KEL. MANCANG KEC. SAMUDERA KAB. ACEH UTARA	DUSUN TOK SAED SYARIF KEL. MANCANG KEC. SAMUDERA KAB. ACEH UTARA	LKN0010-NAR102024BNNP ACEH	8 (LIMA) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU SEBERAT NETTO 107,22 (SERATUS TUJUH KOMA DUA DUA ) GRAM	1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK HONOR NOTE 30 WARNA OBLIDIAN BLACK MELI : 35678587914845	NOMOR: SP/PRN-HAN0020/02024BNNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2
18	SAFRIZAL BIN ZAINAL ABBIDIN	DESA LUONG/ 26 MARET 1997	27	LAKI-LAKI	ISLAM	110814250397004	DUSUN ARA GIRI KEL. LUONG KEC. SAMUDERA KAB. ACEH UTARA	DUSUN ARA GIRI KEL. LUONG KEC. SAMUDERA KAB. ACEH UTARA	LKN0010-NAR102024BNNP ACEH		1 (SATU) UNIT KENDARAAN ROKA DUA (DUA) MERK HONDA PCX WARNA HITAM DENGAN NOMOR POLISI BL 5012 KSP NOKIA MH02117902034 DAN 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK SAMSUNG NOTE 20 ULTRA WARNA HITAM	NOMOR: SP/PRN-HAN0021/02024BNNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA		TAHAP 2

19	MAHESA DARMA BIN MASYKUR	SELOTONG /13 MEI 2003	21	LAKI- LAKI	ISLAM	110319130503001	DUSUN BLANG MEURIA KEL. BUKTI DREIN KEC. SUNGAI RAYAKAB. ACEH TIMUR	DUSUN BLANG MEURIA KEL. BUKTI DREIN KEC. SUNGAI RAYAKAB. ACEH TIMUR	LKN0011-NAR/V/2024/BNP ACEH	2(DUA PULUH SATU) IKAT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GAJAH SEBERAT NETTO 19720.01( SEMBELAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH KOMA NOL SATU ) GRAM	1 (SATU) UNIT HANDPHONE. MERK OPPO A77 WARNA GLAZING BLUE	NOMOR : SPRN-HAN/0022/V/2024/BNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA	TAHAP 2
20	SYAHRIL S BIN SYAHIDAN	SABANG/11 NOVEMBER 1986	37	LAKI- LAKI	ISLAM	117201111870004	KEL. GAJAH AYE KEC. PIDIE KAB. PIDIE	KEL. GAJAH AYE KEC. PIDIE KAB. PIDIE	LKN0011-NAR/V/2024/BNP ACEH	2(DUA PULUH SATU) IKAT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA SEBERAT NETTO 19720.01( SEMBELAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH KOMA NOL SATU ) GRAM	1 (SATU) UNIT HANDPHONE. INFINIX SMART 8 PRO WARNA RAINBOW BLUE. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK NOKIA WARNA HITAM. 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RCDA.2 MERK YAMAHA N MAX WARNA HITAM DENGAN NOMOR POLUSI BL 3004 AL NOKIA M403SC3 120 K332 168V05NG3E4E0467847 1 (SATU) BUAH LEMBAR WARNA HITAM MERK DAMACI. 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK TERPAL WARNA HITAM	NOMOR : SPRN-HAN/0023/V/2024/BNP ACEH TANGGAL 21 MEI 2024	INDONESIA	TAHAP 2
21	MUCHTAR RAJALIL BIN A. JALIL	TUMPOK TELUNGCH31 DESEMBER 1974	49	LAKI- LAKI	ISLAM	117302312740126	JLN KENARI LR II DESA BAND AMASEN KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKESEUMAWE	JLN KENARI LR II DESA BAND AMASEN KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKESEUMAWE	LKN0012-NAR/V/2024/BNP ACEH	1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA SEBERAT NETTO 221.23( DUA RATUS DUA PULUH SATU KOMA DUA TIGA) GRAM DAN 1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SHABU SEBERAT 90.76 ( SEMBELAN PULUH KOMA TUJUH ENAM )	1 (SATU) UNIT HANDPHONE. MERK VIVO TIPE Y 11 WARNA MERAH MAROON	NOMOR : SPRN-HAN/0024/V/2024/BNP ACEH TANGGAL 18 JULI 2024	INDONESIA	TAHAP 2
22	ARMA BIN MUSTAFA	KURU/01 JULI 1975		LAKI- LAKI	ISLAM	1108150107750190	DUSUN KUANG PADI DESA KUBU KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH. PROVINSI ACEHUTARA	DUSUN KUANG PADI DESA KUBU KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH. PROVINSI ACEHUTARA	LKN015-NAR/V/2024/BNP ACEH	1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK BENING DENGAN BERAT 225.8 (DUA RATUS DUA PULUH LIMA KOMA DELAPAN) GRAM. DAN 1 (SATU) PAKET NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK TEH CINA WARNA KUNING KEEMASAN DENGAN BERAT 899.2 (DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBELAN KOMA TUJUH RATUS)	1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK REDMI WARNA HITAM	NOMOR : SPRN-HAN/0025/X/2024/BNP ACEH TANGGAL 02 OKTOBER 2024	INDONESIA	TAHAP 2
23	RAMZI BIN RAZALI HASBI	COT TRIENG.02 JUNI 1989		LAKI- LAKI	ISLAM	117304020890004	DUSUN C LHOEK KUMBANG DESA COT TRIENG KECAMATAN MUARA 1 KOTA LHOKESEUMAWE	DUSUN C LHOEK KUMBANG DESA COT TRIENG KECAMATAN MUARA 1 KOTA LHOKESEUMAWE	LKN015-NAR/V/2024/BNP ACEH	-	-	NOMOR : SPRN-HAN/0025/X/2024/BNP ACEH TANGGAL 02 OKTOBER 2024	INDONESIA	TAHAP 2
24	AHMAD ZARKASY BIN AMRUDDIN	MEURIA PALOH. 01 SEPT 1988		LAKI- LAKI	ISLAM	117304010880001	JLN CEMPAKA LORONG 2 DESA PUNGE JURONG KECAMATAN MELURAXA KOTA BANDA ACEH	JLN CEMPAKA LORONG 2 DESA PUNGE JURONG KECAMATAN MELURAXA KOTA BANDA ACEH	LKN015-NAR/V/2024/BNP ACEH	-	-	NOMOR : SPRN-HAN/0025/X/2024/BNP ACEH TANGGAL 02 OKTOBER 2024	INDONESIA	TAHAP 2

JUMLAH TAHANAN BNP	9 ORANG
JUMLAH TAHANAN LAPAS	1 ORANG
JUMLAH TAHANAN RUTAN	0 ORANG
<b>TOTAL SELURUH TAHANAN</b>	<b>24 ORANG</b>
JUMLAH TAHANAN PRIA	23 ORANG
JUMLAH TAHANAN WANITA	1 ORANG
JUMLAH TAHANAN SUDAH TAHAP II	24 ORANG
JUMLAH TAHANAN SAAT INI YANG MASIH BERADA DI RUTAN BNP	0 ORANG (PRIA - Orang) & (WANITA - Orang)
JUMLAH TAHANAN BNP YANG DI TITIP DI LAPAS/RUTAN (KLB II) atau TITIP DI RUTAN POLDA	0 ORANG (PRIA 3 Orang) & (WANITA - Orang)

*Note: data akan berubah peng update Tahap 2, jangan dilipos, akan terus ber update akan diberikan informasi dan di update jumlah bahannya*

LAPORAN LAYANAN ASESMEN TERPADU

NOMOR REGISTER	NAMA TERSANGKA	INSTANSI PENGIRIM	TANGGAL PENANGKAPAN	TANGGAL PERMOHONAN TAT	TANGGAL PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU	TANGGAL REKOMENDASI	JENIS DAN BERAT BB NARKOTIKA	PASAL YANG DISANGKAKAN	HASIL REKOMENDASI TAT (PENYALAHGUNA/PECANDU, POLA PENGGUNAAN NARKOTIKA, TERLIBAT JARINGAN/TIDAK) (BERITA ACARA)	REKOMENDASI (SURAT REKOMENDASI) (CENTANG V, DIMANA)					PELAKSANAAN REKOMENDASI APAKAH DILAKSANAKAN (YA/TIDAK)		
										REHAB LEMBAGA REHAB		PROSES HUKUM LANJUT					
										RAWAT INAP	RAWAT JALAN	RANAP	RAJAL	REHAB LAPAS/RUTAN		TIDAK REHAB	
1	T. MUHAMMADD FADIL	POLDA ACEH	08 JANUARI 2024	08 JANUARI 2024	12 JANUARI 2024	17 FEBRUARI 2024	METHAMPETAMIN (0,13 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						YA
2	SAFRIO FRANT SIOSA	POLDA ACEH	08 JANUARI 2024	08 JANUARI 2024	12 JANUARI 2024	17 FEBRUARI 2024	METHAMPETAMIN (0,13 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
3	ROBI MAHENDRABIN M. T. AMIN NURDIN	KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN	09 JANUARI 2024	13 MEI 2024	13 MEI 2024	13 MEI 2024	METHAMPETAMIN (0,09 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN		<input checked="" type="checkbox"/>						YA
4	IRHAMI BIN ALM. RAZALI	POLRES ACEH SELATAN	20 JUNI 2024	21 JUNI 2024	24 JUNI 2024	24 JUNI 2024	METHAMPETAMIN (0,12 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
5	FERI JUANDA BIN MAILIZAR	POLRES ACEH SELATAN	20 JUNI 2024	21 JUNI 2024	24 JUNI 2024	24 JUNI 2024	METHAMPETAMIN (0,12 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
6	T. AKBAR IRFAN BIN IRFAN JOHAN	POLRES ACEH BARAT DAYA	28 JUNI 2024	29 JUNI 2024	02 JULI 2024	02 JULI 2024	PLASTIK BUNGKUSAN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
7	T. ASRA ABDIKA RIZKI BIN T. HARDI YUZAR	POLRES ACEH BARAT DAYA	28 JUNI 2024	29 JUNI 2024	02 JULI 2024	02 JULI 2024	PLASTIK BUNGKUSAN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
8	FADIL RAMADHAN BIN MASRIZAL	POLRES ACEH BARAT DAYA	28 JUNI 2024	29 JUNI 2024	02 JULI 2024	02 JULI 2024	PLASTIK BUNGKUSAN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
9	M. ZULKARNAIN BIN AMINUDDIN	POLRES LANGSA	21 JUNI 2024	24 JUNI 2024	02 JULI 2024	03 JULI 2024	METHAMPETAMIN (0,37 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
10	M. SYAHABNA	POLRES LANGSA	21 JUNI 2024	24 JUNI 2024	02 JULI 2024	03 JULI 2024	METHAMPETAMIN (0,37 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN		<input checked="" type="checkbox"/>						YA
11	M. AKBAR BIN AGUSSALIM	POLRES LANGSA	21 JUNI 2025	24 JUNI 2024	02 JULI 2024	03 JULI 2024	METHAMPETAMIN (0,37 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
12	T. ULUL AZMI BIN AMKL	KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA	18 April 2024	04 JUNI 2024	04 JULI 2024	4 JULI 2024	METHAMPETAMIN (0,84 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN			<input checked="" type="checkbox"/>					TIDAK
13	ANSYARI IBRAHIM BIN IBRAHIM	POLRES BANDA ACEH	15 JULI 2024	17 JULI 2024	23 JULI 2024	26 JULI 2024	KANABIS	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
14	JANWAR BIN MUZAKIR HASAN	POLRES BANDA ACEH	18 JULI 2024	19 JULI 2024	25 JULI 2024	26 JULI 2024	METHAMPETAMIN (0,35 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
15	ANDREAN BIN EDI SISWO	POLRES BANDA ACEH	18 JULI 2024	19 JULI 2024	25 JULI 2024	26 JULI 2024	METHAMPETAMIN (0,35 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN					<input checked="" type="checkbox"/>			YA
16	KAUSAR Bin JAMALUDDIN IBRAHIM	POLRES ACEH JAYA	27 JULI 2024	27 JULI 2024	31 JULI 2024	31 JULI 2024	KANABIS, METHAMPETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
17	dr. TAHTA AMIRUL GHUFANI BIN HARIZAL	POLRES ACEH SELATAN	13 AGUSTUS 2024	14 AGUSTUS 2024	15 AGUSTUS 2024	15 AGUSTUS 2024	METHAMPETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
18	FIRMAN, S BIN ALM. SULAIMAN	POLRES ACEH SELATAN	13 AGUSTUS 2024	14 AGUSTUS 2024	15 AGUSTUS 2024	15 AGUSTUS 2024	KANABIS, METHAMPETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
19	SURYA DARMA BIN ALM. AZWAR, S.Pd	POLRES ACEH SELATAN	13 AGUSTUS 2024	14 AGUSTUS 2024	15 AGUSTUS 2024	15 AGUSTUS 2024	METHAMPETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA
20	TARMIZI BIN M. ALI	POLRES ACEH BESAR	19 AGUSTUS 2024	21 AGUSTUS 2024	27 AGUSTUS 2024	29 AGUSTUS	METHAMPETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>							YA

21	YUDI SYAHPUTRA BIN BUDI BARET	POLRES ACEH SINGKIL	17 AGUSTUS 2024	18 AGUSTUS 2024	20 AGUSTUS 2024	20 AGUSTUS 2024	KANABIS, METHAMPHETAMINE	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>						YA
22	IMAN HABIB PILIANG BIN ALM. JULIUS PILIANG	POLRES SUBULUSSALAM	02 September 2024	03 September 2024	05 September 2024	05 September 2024	METHAMPHETAMIN, (0,05) Gram	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN				<input checked="" type="checkbox"/>			YA
23	SUPRI BIN ALM. KASIMIN	POLRES SUBULUSSALAM	02 September 2024	03 September 2024	05 September 2024	05 September 2024	METHAMPHETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN				<input checked="" type="checkbox"/>			YA
24	ZULFIKAR BIN (ALM) BAKHTIAR	POLDA ACEH	29 JULI 2024	03 Oktober 2024	17 Oktober 2024	18 Oktober 2024	METHAMPHETAMIN	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>						YA
25	BOBBY KURNIAWAN Bin IRWANSYAH	POLRESTA BANDA ACEH	25 September 2024	26 September 2024	30 September 2024	30 September 2024	METHAMPETAMIN (0,12 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>						YA
26	MUHAMMAD HELMI Bin NASIR	POLRESTA BANDA ACEH	26 September 2024	26 September 2024	30 September 2024	30 September 2024	METHAMPETAMIN (0,12 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>						YA
27	NASRIANTO ALIAS ANAS BIN ALM M. NASIM	POLRES ACEH TAMIANG	29 JULI 2024	21 November 2024	26 November 2024	27 November 2024	METHAMPETAMIN (0,06 GRAM)	PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009	PENYALAHGUNAAN, TIDAK TERLIBAT JARINGAN	<input checked="" type="checkbox"/>						YA



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,  
IKM dan Presentase Peningkatan  
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI  
YANG TELAH DILAKUKAN  
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

---

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI  
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
<b>BNN</b>	<b>3.51</b>	<b>3.62</b>	<b>85.32</b>
<b>Aceh</b>	<b>3.32</b>	<b>3.6</b>	<b>90.32</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3.50</b>	<b>3.58</b>	<b>92.43</b>
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.76</b>	<b>3.5</b>	<b>83.80</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN  
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
<b>Riau</b>	3.21	<b>3.69</b>	<b>88.55</b>
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
<b>Kepulauan Riau</b>	3.66	<b>3.72</b>	<b>80.21</b>
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	3.67	<b>3.57</b>	<b>91.56</b>
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
<b>Bengkulu</b>	<b>3.68</b>	<b>3.69</b>	<b>78.42</b>
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
<b>Jambi</b>	<b>3.24</b>	<b>3.48</b>	<b>85.14</b>
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3.19</b>	<b>3.63</b>	<b>86.63</b>
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
<b>Lampung</b>	<b>3.6</b>	<b>3.65</b>	<b>83.85</b>
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
<b>Banten</b>	<b>3.93</b>	<b>3.57</b>	<b>76.30</b>
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3.84</b>	<b>3.65</b>	<b>89.79</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>80.20</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.70</b>	<b>3.62</b>	<b>85.40</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>D.I.Yogyakarta</b>	<b>3.74</b>	<b>3.83</b>	<b>87.64</b>
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
<b>Jawa Timur</b>	<b>3.66</b>	<b>3.6</b>	<b>87.46</b>
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>3.23</b>	<b>3.57</b>	<b>88.79</b>
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3.43</b>	<b>3.68</b>	<b>90.69</b>
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3.95</b>	<b>3.7</b>	<b>79.64</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.73</b>	<b>3.7</b>	<b>84.05</b>
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>3.83</b>	<b>3.47</b>	<b>94.66</b>
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
<b>Bali</b>	<b>3.72</b>	<b>3.65</b>	<b>91.18</b>
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.92</b>	<b>3.72</b>	<b>83.95</b>
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.26</b>	<b>3.77</b>	<b>87.18</b>
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>3.18</b>	<b>3.59</b>	<b>92.83</b>
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
<b>Gorontalo</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>77.17</b>

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3.50</b>	<b>3.52</b>	<b>97.22</b>
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>3.81</b>	<b>3.65</b>	<b>87.56</b>
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.94</b>	<b>3.6</b>	<b>75.83</b>
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3.47</b>	<b>3.54</b>	<b>92.14</b>
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
<b>Maluku</b>	<b>3.23</b>	<b>3.22</b>	<b>72.00</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
<b>Maluku Utara</b>	<b>3.08</b>	<b>3.39</b>	<b>74.64</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
<b>Papua</b>	<b>3.29</b>	<b>3.68</b>	<b>97.47</b>
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI ACEH**

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan

Lr. Keuchik Amin Ahmad Batoh Banda Aceh Kode Pos. 23352

Telp : (0651) 8016383

**BNNP ACEH** e-mail : [bnnpaceh@bnn.go.id](mailto:bnnpaceh@bnn.go.id) / Website : [www.aceh.bnn.go.id](http://www.aceh.bnn.go.id)

Nomor : B/urp <sup>35</sup> MKA/RH.00.02/2024/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lamp : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Undangan Peserta

Banda Aceh, 27 Mei 2024

Kepada  
Yth. **Daftar terlampir**  
di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2024.
- e. DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor : SP DIPA-066.01.2.682541/2024, Tahun Anggaran 2024 Tanggal 24 November 2023;

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh akan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas IBM dalam rangka Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi T.A 2024, Pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 s/d 30 Mei 2024

Waktu : 08.30 s.d selesai.

Tempat : Aula Kantor BNNP Aceh

Jl. Dr.Mr. Mohd Hasan , Lr. Keuchik Amin Ahmad Batoh Banda Aceh Kode Pos. 23352

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, kami mengundang saudara/i untuk menjadi peserta pada kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdra.Nasrullah, S.Hi HP : 0813.6001.6589.

4. Demikian untuk dimaklumi atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Aceh**

  
**Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M**  
**Brigadir Jenderal Polisi**

**Tembusan :**

1. Kepala BNN RI;
2. Inspektur Utama BNN RI
3. Deputi Rehabilitasi BNN;

**DAFTAR PESERTA**  
**KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS IBM DALAM RANGKA AGEN**  
**PEMULIHAN YANG DILATIH KOMPETENSI TEKNIS REHABILITASI T.A 2024**  
**DI AULA BNNP ACEH, TANGGAL 28 S.D 30 MEI 2024**

No	Nama Peserta	Jumlah	Ket
1	Ismail	Ketua TIM IBM Gampong Meunasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	
2	Rizaldi Rafsanjani	Sekretaris IBM Gampong Meunasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	
3	Burhan, S.Sos	Anggota Tim IBM Gampong Meunasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	
4	Ilyas Ibrahim	Anggota Tim IBM Gampong Meunasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	
5	Isafuddin Idris	Anggota Tim IBM Gampong Meunasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	
6	Anwar. AR	Ketua TIM IBM Gampong Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar	
7	Muhammad HS	Sekretaris IBM Gampong Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar	
8	Muhammad ABD	Anggota TIM IBM Gampong Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar	
9	Mukhsin	Anggota TIM IBM Gampong Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar	
10	Jufrizal Wahadi	Anggota TIM IBM Gampong Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar	

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Aceh

  
**Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M**  
Brigadir Jenderal Polisi

**Tembusan :**

1. Kepala BNN RI;
2. Inspektur Utama BNN RI;
3. Deputi Rehabilitasi BNN;



BNNP ACEH

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI ACEH

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan

Lr. Keuchik Amin Ahmad Batoh Banda Aceh Kode Pos. 23352

Telp : (0651) 8016383

e-mail : [bnnp\\_aceh@bnn.go.id](mailto:bnnp_aceh@bnn.go.id) / Website : <https://aceh.bnn.go.id>

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin *1284*/VIKA/RH.00.02/2024/BNNP

**Menimbang** : bahwa untuk melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas IBM dalam rangka Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi, maka di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

**Dasar** :

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2024;

## MEMERINTAHKAN

**Kepada** : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

**Untuk** :

1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Pengajar Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas IBM dalam rangka Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi T.A 2024, Di Aula Kantor BNNP Aceh;
2. surat perintah ini berlaku pada Tanggal 28 s/d 30 Mei 2024;
3. kegiatan ini didukung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh No: SP DIPA-066.01.2.682541/2024 T.A 2024 Tanggal 24 November 2023 dengan kode Akun 3259.PDG.001.051.A Bimbingan Teknis Petugas IBM;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
5. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 Mei 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Aceh

### Tembusan :

1. Kepala BNN RI;
2. Inspektur Utama BNN RI;
3. Deputi Rehabilitasi BNN;

*Marzuki*  
Drs. Marzuki Aji Basyah, M.M

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN : SURAT PERINTAH KEPALA BNNP ACEH  
NOMOR : SPRIN/ 284/V/KA/RH.01.00/2024/BNNP  
TANGGAL : 27 MEI 2024**

**DAFTAR NAMA PENGAJAR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS IBM DALAM  
RANGKA AGEN PEMULIHAN YANG DILATIH KOMPETENSI TEKNIS REHABILITASI  
DI AULA KANTOR BNNP ACEH, PADA TANGGAL 28 S.D 30 MEI 2024**

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	KET
1	2	3		4
1.	Saiful, S.Pd	Konselor Adiksi Ahli Muda	BNNP Aceh	
2.	Shafriani, SKM	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	BNNP Aceh	
3.	Nasrullah, S.Hi	Konselor Adiksi	BNNP Aceh	
4.	Zulfan Fikri, SE	Konselor Adiksi	BNNP Aceh	

Dikeluarkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 Mei 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Aceh

  
Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,  
IKM dan Presentase Peningkatan  
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI  
YANG TELAH DILAKUKAN  
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

---

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI  
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
<b>BNN</b>	<b>3.51</b>	<b>3.62</b>	<b>85.32</b>
<b>Aceh</b>	<b>3.32</b>	<b>3.6</b>	<b>90.32</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3.50</b>	<b>3.58</b>	<b>92.43</b>
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.76</b>	<b>3.5</b>	<b>83.80</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
<b>Riau</b>	3.21	<b>3.69</b>	<b>88.55</b>
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
<b>Kepulauan Riau</b>	3.66	<b>3.72</b>	<b>80.21</b>
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	3.67	<b>3.57</b>	<b>91.56</b>
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
<b>Bengkulu</b>	<b>3.68</b>	<b>3.69</b>	<b>78.42</b>
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
<b>Jambi</b>	<b>3.24</b>	<b>3.48</b>	<b>85.14</b>
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3.19</b>	<b>3.63</b>	<b>86.63</b>
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
<b>Lampung</b>	<b>3.6</b>	<b>3.65</b>	<b>83.85</b>
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
<b>Banten</b>	<b>3.93</b>	<b>3.57</b>	<b>76.30</b>
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3.84</b>	<b>3.65</b>	<b>89.79</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>80.20</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.70</b>	<b>3.62</b>	<b>85.40</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>D.I.Yogyakarta</b>	<b>3.74</b>	<b>3.83</b>	<b>87.64</b>
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
<b>Jawa Timur</b>	<b>3.66</b>	<b>3.6</b>	<b>87.46</b>
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>3.23</b>	<b>3.57</b>	<b>88.79</b>
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3.43</b>	<b>3.68</b>	<b>90.69</b>
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3.95</b>	<b>3.7</b>	<b>79.64</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.73</b>	<b>3.7</b>	<b>84.05</b>
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>3.83</b>	<b>3.47</b>	<b>94.66</b>
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
<b>Bali</b>	<b>3.72</b>	<b>3.65</b>	<b>91.18</b>
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.92</b>	<b>3.72</b>	<b>83.95</b>
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.26</b>	<b>3.77</b>	<b>87.18</b>
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>3.18</b>	<b>3.59</b>	<b>92.83</b>
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
<b>Gorontalo</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>77.17</b>

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3.50</b>	<b>3.52</b>	<b>97.22</b>
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>3.81</b>	<b>3.65</b>	<b>87.56</b>
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.94</b>	<b>3.6</b>	<b>75.83</b>
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3.47</b>	<b>3.54</b>	<b>92.14</b>
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
<b>Maluku</b>	<b>3.23</b>	<b>3.22</b>	<b>72.00</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
<b>Maluku Utara</b>	<b>3.08</b>	<b>3.39</b>	<b>74.64</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
<b>Papua</b>	<b>3.29</b>	<b>3.68</b>	<b>97.47</b>
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>Papua Barat</b>	3.66	3.64	<b>100.00</b>
<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido</b>	4	3.64	<b>76.99</b>
<b>Balai Rehabilitasi BNN Baddoka</b>	4	3.63	<b>83.11</b>
<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b>	4	3.65	<b>67.97</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Batam</b>	4	3.76	<b>85.76</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang</b>	3.81	3.64	<b>89.25</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Kalianda</b>	4	3.69	<b>63.69</b>

